

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan dari berbagai kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh sebagian besar negara-negara, khususnya negara sedang berkembang adalah untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakatnya. Pembangunan ekonomi hanyalah merupakan sebagian dari keseluruhan usaha pembangunan.

Masalah pembangunan ekonomi bukanlah suatu hal yang baru dalam ilmu ekonomi, karena studi tentang pembangunan ekonomi tersebut telah menarik perhatian para pakar ekonomi sejak zaman Kaum Merkantilis, Kaum Klasik, sampai Mark dan Keynes.

Masa kebangkitan kembali perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi ini dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua (PD II). Berarti setelah zaman Adam Smith sampai PD II perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi tersebut sangatlah kurang.

Di Indonesia sendiri sedang terjadi suatu masa transisi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan penduduk. Masa transisi yang sedang hangat dibicarakan itu dalam otonomi daerah. Pada akhir-akhir ini Otonomi Daerah menarik perhatian dan menjadi diskusi yang meluas dikalangan masyarakat. Di dalam UU No.32 tahun 2004 lebih banyak menitik beratkan kepada penyelenggaraan pemerintah yang harus meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah. Dimana pemerintah perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antar

pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kondisi perekonomian Jawa Tengah secara umum menunjukkan arah yang lebih baik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dengan semakin bergairahnya kinerja perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2005 yaitu ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 persen. Kinerja perbaikan ekonomi nasional ini telah membawa dampak pada kondisi yang lebih baik pada perekonomian regional.

Kota Surakarta, dalam era otonomi didukung dengan situasi yang relatif kondusif, secara makro perekonomian meningkat sebesar 5,15 persen pada tahun 2005, lebih kecil dibanding tahun 2004 (5,80). ( PDRB Kota Surakarta, 2005)

Orientasi terhadap kebijaksanaan otonomi daerah menjadi suatu kekuatan bagi daerah yang sangat memungkinkan daerah untuk melakukan optimalisasi semua *resources*-nya. Kota Surakarta dalam hal ini perlu jeli dalam memberdayakan potensi alam setempat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam rangka meningkatkan hasil daerah. Selain itu, perlu juga upaya agar setiap daerah memiliki keunggulan tertentu yang berbeda dengan daerah lain. Antisipasi yang perlu dilakukan adalah menentukan sektor apa pada Kota Surakarta ini yang menjadi sektor bisnis (unggulan) dibandingkan dengan daerah dibawahnya. Dengan demikian, maka pembangunan dapat

diarahkan pada pengembangan dan pembinaan keunggulan tersebut dimasa mendatang.

Otonomi daerah adalah salah satu aspek pemerintahan yang sangat penting dalam mendukung mekanisme pemerintah yang efektif dan efisien, serta sebagai suatu strategi untuk mendorong dan mempercepat pembangunan dan pertumbuhan daerah. Salah satu potensi daerah yang perlu dibangun dan dimantapkan adalah Authorita Daerah, yaitu daerah sebagai daerah otonomi perlu sekali memiliki kewenangan (*power, authority, kompetensi*) yang sangat jelas sebagai landasan menyelenggarakan pemerintah daerah.

Dengan adanya pertimbangan di atas akhirnya pemerintahan berusaha untuk mewujudkan otonomi daerah secara menyeluruh. Undang-Undang No.32 tahun 2004 kemudian diganti dengan Undang-Undang No.12 tahun 2008 yang mengatur Undang-Undang No.32 tahun 2004 menjadi tentang Pemerintah Daerah kembali.

Dengan adanya otonomi daerah, kepada daerah diberikan kewenangan-kewenangan tambahan dalam bentuk urusan-urusan yang diserahkan oleh departemen teknis berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan maksud dan tujuan dari perundang-undangan diatas, pemerintah daerah telah menetapkan bahwa strategi pembangunan ditekankan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat agar lebih merata dan sekaligus ditujukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Strategi pembangunan ini telah dituangkan dalam Pembangunan Lima Tahun Daerah dan merupakan strategi yang dianggap paling tepat untuk lebih memacu pertumbuhan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Secara

lebih luas, dengan strategi ini diharapkan dapat diwujudkan keseluruhan potensi yang dimiliki kota Surakarta.

Aspek penting yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah. Melihat kecenderungan masih terbatasnya sumber-sumber keuangan daerah, peluang investasi dalam rangka pengembangan ekonomi daerah di segala bidang akan semakin dituntut untuk mampu mencari peluang sebagai sumber pendapatan. Potensi yang dapat digali di daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi suatu negara (Prayitno, 1986:28 dalam Yustika, 2006:89), yaitu menaikkan pendapatan nasional (GNP) riil, meningkatkan produktivitas nasional, dan pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat. Salah satu langkah tepat yang ditempuh pemerintah daerah adalah mempertimbangkan perlunya peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara maksimal, melalui kegiatan identifikasi dan analisis pertumbuhan ekonomi daerah terhadap semua sektor strategis. Dengan diketahuinya sektor unggulan tersebut, membuat pertumbuhan ekonomi daerah bisa mempengaruhi sektor-sektor lain sehingga menyumbang pemerataan hasil-hasilnya bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Pembangunan daerah selalu merujuk pada pembangunan nasional yakni pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Artinya pembangunan yang meliputi aspek lahir (seperti makanan, pakaian, perumahan) dan batin (seperti pendidikan, keamanan, hiburan, status sosial

dan kesempatan kerja). Manusia yang menjangkau seluruh masyarakat tanpa membedakan keberagaman yang ada (suku, agama, ras, dan lainnya). Kesemuanya memerlukan perencanaan yang cermat dan terarah.

Salah satu upaya pencapaian sasaran umum pembangunan jangka panjang di Jawa Tengah dilaksanakan melalui pembangunan di bidang ekonomi. Sasarannya adalah memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang mendasarkan pada sistem kerakyatan yaitu terciptanya perekonomian yang mandiri dan handal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi. Program pembangunan ekonomi berkelanjutan bertujuan untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang yang bertumpu pada sektor produksi yang maju dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh serta sektor-sektor lain diluar pertanian dipacu untuk mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi daerah, peningkatan kemakmuran rakyat yang semakin merata, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang mantap. Dengan bercirikan industri yang kuat dan perdagangan yang maju serta pertanian yang tangguh, didorong oleh kemitrausahaan yang kuat antar badan usaha, koperasi, pemerintah dan swasta, serta pemberdayagunaan sumber daya alam yang optimal yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maju, produktif, dan profesional, iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu teknologi. (Lilis, 2003)

Penetapan komoditi unggulan yang dilakukan oleh pemerintah daerah biasanya berdasarkan potensi daerah. Namun demikian, tidak terlalu jelas bagaimana sebenarnya suatu komoditi (ditetapkan) menjadi komoditi

unggulan daerah. Ada daerah yang menggunakan produk khas (misalnya salak pondoh, tempat wisata, jumlah usaha (gula aren, gerabah, kulit), banyak menyerap tenaga kerja dan sebagainya. Bahkan, ada daerah yang komoditi unggulannya ditentukan bias terhadap instansi/dinas yang ada (dinas pertanian menyebut padi, peternakan menyebut penggemukan sapi, perikanan menyebut ikan air tawar, dan sebagainya). Akibatnya, pengembangan komoditi unggulan menjadi tidak fokus dan spesialisasi daerah tidak terwujud.(Sugianto, 2007)

Pilihan terhadap komoditas unggulan daerah mestinya menyangkut masalah yang dihadapi oleh daerah. Apabila daerah menghadapi masalah pengangguran, maka pilihan produk unggulan mestinya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Namun harus diingat, produk tersebut juga harus bisa bersaing dipasar.(Sugianto, 2007)

Proses pembangunan ekonomi daerah di Jawa Tengah telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan rata-rata selama periode penelitian (1985-2000) sebesar 5,33% per tahun, dan nilai PDRB per kapita dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,29% per tahun.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya pembangunan ekonomi daerah Jawa Tengah dan untuk dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi daerah secara optimal maka perencanaan pembangunan daerah dapat disusun menurut tinjauan antar sektor. Perencanaan sektoral menekankan pada sektor-sektor tertentu yang memiliki keunggulan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Perencanaan sektoral dimaksudkan untuk pengembangan sektor-sektor tertentu disesuaikan dengan keadaan dan potensi masing-masing sektor dan juga tujuan pembangunan yang ingin

dicapai. Pengembangan terhadap sektor-sektor unggulan dapat digunakan dalam penyusunan skala prioritas.

Di Indonesia daerah selalu mendapat perhatian khusus. Tidak ada negara yang memiliki keragaman seperti Indonesia dalam hal ekologi, demografi, ekonomi, etnis, agama, dan budaya. Kota Surakarta juga merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi unggulan, maka Kota Surakarta perlu memperhatikan dalam membudayakan potensi alam agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam rangka meningkatkan hasil daerah. Selain itu, perlu juga upaya agar setiap kota memiliki keunggulan tertentu yang berbeda dengan kota yang lainnya. Antisipasi yang perlu dilakukan adalah menentukan sektor apakah pada kota Surakarta yang menjadi sektor basis (unggulan) dibandingkan dengan kota lainnya di Propinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, maka pembangunan dapat diarahkan pada pengembangan dan pembinaan keunggulan tersebut dimasa yang akan datang.

Memburuknya tingkat perekonomian tidak boleh dibiarkan berlangsung terus menerus. Tiap-tiap daerah harus segera terlepas dari bayang-bayang krisis multidimensi. Untuk itu perlu diupayakan menumbuhkembangkan sektor riil agar perekonomian segera membaik sehingga cita-cita pembangunan ekonomi dapat segera terwujud. Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi perlu kerja keras, ketekunan dan perjuangan yang tidak ringan serta kerja sama semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembangunan ekonomi dengan tujuan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan penduduk, menjadi tolak ukur kemampuan suatu wilayah.

Dalam kurun lima tahun terakhir sektor industri pengolahan masih merupakan sektor yang menjadi andalan yang terbesar di Kota Surakarta. Hal ini ditandai dengan sumbangannya terhadap total PDRB Kota Suarakarta yaitu berkisar di atas 26 persen, paling tinggi di banding dengan sektor lain.

Selanjutnya yang memberikan sumbangan terbesar setelah sektor industri pengolahan adalah sektor perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Bangunan, pada tahun 2005 ini masing-masing memberikan sumbangan sebesar 23,82 persen dan 12,89 persen. Pertambangan dan pertanian merupakan sektor yang memnberikan sumbangan terkecil yakni hanya sebesar 0,04 persen dan 0,06 persen. Secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang berarti, masing-masing sektor masih dalam posisi yang sama.

Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, pendapatan perkapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian disuatu wilayah.

Perkembangan pendapatan perkapita di Kota Surakarta atas dasar harga berlaku, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 pendapatan perkapita masih mencapai angka sebesar 6.028.761,70 rupiah, tahun 2005 sudah menjadi 10.453.952,56 rupiah atau naik sebesar 53 persen. Demikian juga pendapatan perkapita atas dasar harga konstan, dalam kurun 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak sebesar harga berlaku. (BPS Surakarta, 2005)

Banyak kesempatan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan sesuai dengan peluang, potensi, dan



kebutuhan masyarakatnya. Adanya otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani. Otonomi daerah diharapkan pula mampu meningkatkan pemerataan hasil pembangunan nasional untuk memacu pemerintah daerah dalam memaksimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan potensi yang terdapat di masing-masing daerah secara terpadu dengan mempertimbangkan keterbatasan kelembagaan, kemampuan prasarana dan anggaran keuangan daerah. Hal itu sebagai usaha untuk meningkatkan kreativitas masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pembangunan daerah.

Kota Surakarta dituntut untuk lebih mandiri dan lebih waspada dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah agar daerah pada akhirnya dapat mempunyai kekuatan *financial* maupun sektoral untuk tetap bertahan dan bersaing dengan daerah lainnya, walaupun kondisi perekonomian dipusat masih labil.

Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi di Indonesia perlu diketahui adanya *economi base*. Suatu sistem ekonomi untuk mengetahui sektor unggulan masing-masing daerah.

## **B. Perumusan Masalah**

Terdapat *economi base* disuatu daerah menjadi salah satu faktor yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sektor-sektor apa saja yang dapat menjadi sektor basis di Kota Surakarta yang nantinya akan menjadi sektor unggulan di Propinsi Jawa Tengah.
2. Bagaimana posisi dan reposisi sektor basis dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.
3. Faktor-faktor apa saja yang menentukan posisi dan reposisi sektor basis dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sektor apa yang menjadi basis pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta sebagai salah satu penyangga perekonomian di Propinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui posisi dan reposisi sektor basis dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menentukan posisi dan reposisi sektor basis dalam perekonomian ekonomi di Kota Surakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Mengetahui sektor basis di Kota Surakarta yang nantinya menjadi sektor unggulan di Propinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui laju pertumbuhan sektor tersebut atau sektor unggulan terhadap PDRB.

3. Mengetahui penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi posisi dan reposisi sektor basis di Propinsi Jawa Tengah.
4. Diharapkan menjadi suatu masukan-masukan, tambahan pemikiran, dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya bagi pemerintah daerah yaitu Kota Surakarta.
5. Diharapkan dapat dijadikan suatu perbandingan pertumbuhan laju ekonomi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Surakarta dan merumuskan kebijaksanaan pembangunan sektoral di masa yang akan datang.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### A. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

##### 1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

###### a. Menurut Meier dan Baldwin

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses bagaimana suatu negara meningkatkan pendapatan nasional per kapita dalam suatu jangka waktu yang panjang.

Adapun menurut Meier, tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

Yaitu membangun identitas bangsa (dipengaruhi oleh falsafah bangsa), memperbesar *output* nasional, memperbesar pendapatan masyarakat.

Tujuan samping :

Yaitu distribusi pendapatan yang merata, tingkat kegiatan yang *full employment*, meningkatkan pembangunan daerah, memerangi kemiskinan dan memerangi pengangguran.

###### b. Menurut Sumitro Djojohadikusumo

Pembangunan ekonomi adalah suatu usaha atau kegiatan suatu negara untuk memperbesar pendapatan *riil* per kapita dan produktifitas per kapita dengan menambah peralatan modal dan menambah *skill*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi lebih menekankan pada kegiatan pencapaian tujuan. Dimana

perhubungan ekonomi merupakan salah satu ciri utama dalam proses pembangunan.

c. Menurut Arsyad

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

d. Menurut Sadono Sukirno

Pembangunan ekonomi adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.

e. Menurut Michel Todaro

Keberhasilan pembangunan ekonomi oleh tiga nilai pokok yaitu:

- a) Berkembangan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*)
- b) Meningkatkan rasa harga diri (*self syestem*) masyarakat sebagai manusia.
- c) Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Pembangunan ekonomi pada umumnya di definisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan *riil* per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Dari definisi diatas jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tujuan :

- a) Suatu proses yang berarti perubahan yang terus menerus.
- b) Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita.
- c) Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
- d) Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari aspek-aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang *regulasi* (baik formal maupun informal).

## 2. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Perhatikan tekanan pada tiga aspek, yaitu: proses, *output* per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.  
(DR.Boediono,1999)

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan *output* per kapita. Jelas ada dua sisi yang perlu di perhatikan. Yaitu sisi *output* total nya (GDP) dan sisi jumlah penduduk nya. *Output* per kapita adalah *output* total dibagi jumlah penduduk. Proses kenaikan *output* per kapita, tidak bisa, harus dianalisa dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan *output* total di satu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak. Suatu teori pertumbuhan ekonomi yang lengkap harus bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP total dan apa yang terjadi dengan jumlah penduduk. Teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP total, dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut bisa dijelaskan, maka perkembangan output per kapita bisa dijelaskan.

Aspek yang ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan *output* per kapita bukan pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama (10, 20, atau 50 tahun, atau bahkan lebih lama lagi) mengalami kenaikan *output* per kapita. Tentu bisa terjadi pada suatu tahun, *output* per kapita merosot (misalnya, karena kegagalan panen). Tetapi apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut *output* per kapita menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk kenaikan, maka kita katakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi.

Arsyad membedakan pengertian pembangunan ekonomi (*economic development*) dan pertumbuhan (*economic growth*) yang intinya

mengatakan bahwa pembangunan ekonomi menyatakan dalam tingkat pertumbuhan GDP/GNP pada suatu tahun tertentu melebihi tingkat pertumbuhan penduduk atau perkembangan GDP yang terjadi dalam suatu negara diikuti oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonomi.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Dikatakan pada pertumbuhan ekonomi apabila terdapat lebih banyak output. Pertumbuhan dapat meliputi penggunaan lebih banyak input atau lebih efisien adanya kenaikan output persatuan input. (Suparmoko, 1993).

Adapun faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: faktor ekonomi dan faktor non ekonomi .

a) Faktor ekonomi meliputi:

- Akumulasi Modal

Dalam hal ini termasuk semua investasi batu terwujud tanah (lahan), peralatan fiskal dan sumber daya manusia (human resources).

- Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja berarti semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.



- Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

- Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan faktor terpenting bagi pertumbuhan ekonomi. Di dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

b) Faktor Non Ekonomi meliputi

- Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan barat membawa kearah penalaran (*reasoning*) dan *skeptisisme*. Ia menanamkan semangat membara yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas pedagang baru.

- Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka.

- Politik dan Administratif

Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Pertumbuhan ekonomi Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Jepang, dan Perancis merupakan hasil dari stabilitas politik dan administrasi mereka yang kokoh sejak abad ke-19.

### **3. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan intitusi-intitusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Pemerintah Daerah harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Sedangkan pembangunan regional itu sendiri mencakup pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan sumberdaya alamnya agar dapat meningkatkan kehidupan rakyatnya yang berdiam dilingkungan wilayahnya.

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin. Pembangunan nasional maupun pembangunan daerah merupakan usaha besar yang membutuhkan dana yang besar, tenaga yang banyak yaitu pelaksanaan yang lama, sehingga membutuhkan adanya perencanaan yang matang.

Dimensi ekonomi yang paling tradisional dari pembangunan daerah berkisar pada tujuan untuk pemerataan pembangunan antar daerah, pemerataan pembangunan disetiap daerah dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Kepentingan pembangunan antar daerah seringkali dalam konflik dengan pembangunan disetiap daerah, dan juga dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengertian pembangunan daerah dapat dibedakan dalam dua pengertian. Pengertian yang pertama, yang merupakan pengertian yang acap kali digunakan dinegara kita, dimaksudkan untuk menyatakan tentang pembangunan dalam suatu daerah, misalnya daerah Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi dan sebagainya. Disamping itu istilah tersebut dapat diartikan sebagai pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayah dan dalam konteks ini istilah yang lebih tepat digunakan adalah pembangunan wilayah. Dalam pengertian yang kedua ini strategi pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro sektoral dari pembangunan nasional. (J.Friedman dan W Alonso dalam Sadono Sukirno)

#### **4. Konsep Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Definisi pembangunan ekonomi yang paling banyak diterima adalah definisi dari Meir dalam Kuncoro (1997:17) yang mendefinisikan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses dimana suatu negara mampu meningkatkan pendapatan perkapita penduduk selama kurun waktu yang panjang dengan melihat bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat serta distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Proses dalam arti berlangsungnya kekuatan-kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi.

Rostow mendefinisikan pembangunan ekonomi dalam Arsyad (1999:49) sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem ekonomi. Jika perubahan-perubahan itu

terjadi maka proses pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan sudah terjadi suatu masyarakat yang sudah mencapai proses pertumbuhan yang sifatnya demikian.

### **Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad,1999:108).

Pembangunan daerah jika dituangkan dalam bentuk model matematika merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, kewirausahaan, transportasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi pasar internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat, dan bantuan-bantuan pembangunan (Arsyad, 1999:15).

Konsep region yang biasa digunakan dalam analisis ekonomi regional antara lain:

- a) Konsep pertama yaitu *Homogeneous Region* yang mendefinisikan berdasarkan persamaan karakteristik beberapa daerah. Karakteristik yang dimaksud antara lain pendapatan perkapita, kepadatan penduduk, jenis produksi utama, problema sosial, tingkat industrialisasi dan lain-lain.

- b) Konsep kedua yaitu *Modal Region* yang lebih menekankan pada tingkat keterkaitan antara masing-masing daerah. Tingkat keterkaitan tersebut biasanya diukur berdasarkan arus lalu lintas barang, penduduk maupun modal.
- c) Konsep ketiga adalah *Planning Region* pengelompokkan berdasarkan pada kesatuan politik atau kesatuan administrasi, seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Jadi daerah disini didasarkan pada pembagian administratif suatu negara.

## 5. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

Ada beberapa teori yang dapat membantu untuk mengetahui arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakekatnya inti dari teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu: metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu (Arsyad, 1999).

### 1. Teori Ekonomi Neo-Kalsik

Teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor-faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal mengalir tanpa retriksi (pembatasan). Oleh karena itu modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah. (Aryad, 1999)

## 2. Teori Basis Ekonomi

Teori ini dikemukakan oleh Harry W, Richardson yang mengatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah hubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber-sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor, akan menghasilkan kelayakan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*). (Arsyad, 1999)

## 3. Teori Lokasi

Teori ini dikemukakan oleh Weber, bahwa perusahaan akan cenderung meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar. Model ini mengatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar. (Arsyad, 1999)

## 4. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada teori tempat setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah pendukungnya. (John Glasson, 1997)

## 5. Teori Kausasi Kumulatif

Teori ini menyatakan bahwa kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperarah kesenjangan antara daerah-daerah maju versus

daerah-daerah terbelakang. Daerah maju mengalami akumulasi atau keunggulan kompetitif dibanding daerah lainnya. (Arsyad, 1999)

#### 6. Teori Harrod Domar

Teori ini merupakan teori yang menganalisis tentang syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Inti pemikiran dalam teori ini adalah setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Walaupun begitu, untuk dapat menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan modal. Sehingga teori menunjukkan syarat-syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap. Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi didalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki oleh investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan, dan kedua ia memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Yang pertama dapat disebut sebagai dampak permin taan dan yang kedua dampak penawaran investasi.

Harrod Domar tetap mempertahankan pendapat dari ahli-ahli ekonomi terdahulu yang menekankan peranan pembentukan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori ini pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian



untuk menghasilkan barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Analisis Harrod Domar bertujuan untuk menunjukkan syarat yang diperlukan supaya dalam jangka panjang kemampuan memproduksi yang bertambah dari masa ke masa akan selalu sepenuhnya digunakan. (Jhingan, 1993)

#### 7. Teori Schumpiter

Schumpiter membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. . (John Glasson, 1997)

Menurut Schumpiter terdapat lima macam kegiatan yang dimasukkan sebagai inovasi:

- a) Diperkenalkan produk baru yang sebelumnya tidak ada.
- b) Diperkenalkannya cara berproduksi baru.
- c) Pembukaan daerah-daerah pasar baru.
- d) Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru.
- e) Perubahan organisasi industri sebagai efisiensi industri.

#### 8. Model Daya Tarik Industri.

Teori daya tarik industri adalah model yang mendasarkan bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan intensif. (Arsyad, 1999)

## 9. Teori Pertumbuhan Model Basis

Konsep basis ekonomi bermula dari kebutuhan untuk memprediksikan pengaruh aktivitas ekonomi baru di kota dan di daerah. Model basis ekonomi di buat untuk mengidentifikasi atau menargetkan sektor di daerah. Menurut Ghali (1997) dalam model basis ekonomi penentu satu-satunya pertumbuhan ekonomi adalah ekspor. Sektor daerah yang bersifat basis menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sektor basis adalah semua sektor lokal yang menjual kelebihan produknya dan melayani konsumen di luar daerah lokal. Model basis ekonomi atau model permintaan adalah pengembangan dari bentuk produk daerah yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes (Ibid: 38-39 dalam Sri Rahayu dan Daryono S, 2004:84).

Model basis ekonomi agak berbeda dengan model tipe Keynes. Yang dijelaskan dalam model basis ekonomi adalah perubahan pendapatan nasional. Fungsi tabungan dalam menciptakan kebocoran dianggap sebagai impor, yang merupakan fungsi dari pendapatan. Sedangkan fungsi investasi diasumsikan sebagai ekspor yang merupakan pendorong dari perekonomian yang berbasis ekonomi (ekspor).

## 10. Teori Basis Ekspor (*Export Base Theory*)

Menurut Hoover (1984), teori pertumbuhan berbasis ekspor atau berbasis ekonomi menerangkan bahwa beberapa aktivitas di suatu daerah adalah *basic* dalam arti bahwa pertumbuhannya menimbulkan

dan menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas-aktivitas *non basic* merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruh tersebut. Sedangkan menurut Bendavid-Val (1991), semua pertumbuhan regional ditentukan oleh sektor *basic*, sedangkan sektor *non basic* mencakup aktivitas-aktivitas pendukung seperti perdagangan, jasa-jasa perseorangan, produksi untuk pasar lokal dan produksi input untuk produk-produk di sektor *basic*, melayani industri-industri di sektor *basic* maupun pekerja-pekerja beserta keluarganya di sektor *basic*.

Blair (1991) dan Hoover (1984) juga menyatakan teori pertumbuhan berbasis ekspor atau berbasis ekonomi tertanam dalam gagasan bahwa perekonomian lokal harus menambah aliran yang masuk agar tumbuh dan satu-satunya cara yang efektif untuk menambah aliran uang masuk adalah menambah ekspor.

Tiebot (1962) menggambarkan pentingnya ekspor sebagai berikut: pasar ekspor dipandang sebagai penggerak utama perekonomian lokal. Bila kesempatan kerja yang melayani pasar ini naik turun, kesempatan kerja yang melayani pasar lokal juga naik turun. Bila pabrik (ekspor) tutup, pedagang eceran (lokal) merasakan dampaknya karena para pekerja pabrik yang diberhentikan tidak memiliki uang untuk dibelanjakan, karena peranan penggerak utama itu, kesempatan kerja ekspor dipandang sebagai “dasar” (*basic* atau *basis*). Kesempatan kerja yang melayani pasar lokal dipandang menyesuaikan atau adaptif dan diberi istilah “non dasar”.

Pendapatan yang semula diterima oleh sektor ekspor dibelanjakan dan dibelanjakan lagi di daerah setempat, sehingga menciptakan tambahan pendapatan melalui pengganda. Karyawan-karyawan yang menciptakan perekonomian lokal, pada gilirannya membelanjakan penghasilan mereka secara lokal, hingga menciptakan pekerjaan-pekerjaan tambahan. Besarnya angka pengganda bergantung pada kesediaan individu-individu untuk membelanjakan uang mereka di perekonomian lokal daripada membelanjakan di luar daerah setempat. (Soepono, 200:41-43 dalam Sri Rahayu dan Daryono S, 2004:86).

Karena setiap negara berbeda dengan negara yang lainnya ditinjau dari sudut sumber alamnya, iklimnya, letak geografinya, penduduk, keahliannya, tenaga kerja, tingkat harga, keadaan struktur ekonomi dan sosialnya. Hal ini memungkinkan karena ada barang yang hanya dapat diproduksi di daerah dan iklim tertentu atau karena suatu negara mempunyai kombinasi faktor-faktor produksi lebih baik dari negara lainnya, sehingga negara itu dapat menghasilkan barang yang lebih dapat bersaing. Adakala produksi dari suatu negara belum dapat dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri, maka hal ini semenjak berabad-abad yang lalu telah mendorong orang untuk memperdagangkan hasil produksi itu ke negara lainnya di luar batas negaranya (Amir M.S, 2000:1).

Arsyad (1992) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai proses ketika PDB (Produk

Domestik Bruto) riil atau pendapatan riil perkapita meningkat secara terus-menerus melalui kenaikan produktivitas perkapita. Sasaran berupa kenaikan produksi riil dan taraf hidup merupakan tujuan utama yang perlu dicapai melalui penyediaan dan sumber-sumber produksi.

Pembangunan ekonomi (*economic development*) mempunyai pengertian yang berbeda dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pembangunan ekonomi sebagai (Arsyad, 1992:15) :

- a. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP (*Gross Domestik Product*) / GNP (*Gross National Product*) pada suatu tingkat tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk, atau
- b. Perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam suatu negara diikuti oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya.

Pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tujuannya. Dari aspek ekonomi daerah memiliki tiga pengertian (Arsyad, 1999:107), yaitu :

- a) Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, sosial budayanya, geografinya, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah homogen.
- b) Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal.

- c) Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berbeda di bawah suatu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya.

Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administratif suatu negara. Daerah dalam pengertian ini dinamakan daerah administratif atau daerah perencanaan.

Pengembangan daerah merupakan upaya terpadu yang menggabungkan dimensi kebijakan pengembangan masyarakat, perwujudan pemerintah yang baik, integrasi ekonomi antar wilayah dan keterkaitan ekonomi global, pelayanan regional dan lokal, pengelolaan pertanahan dan tata ruang, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, serta penanganan secara khusus daerah-daerah yang mempunyai masalah sosial, ekonomi dan politik yang serius. Soemarno (2000:29) dalam Liling (2006:17) menyebutkan bahwa untuk mendorong pembangunan daerah langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Melokalisasi strategi pengembangan fisik (*Locality of Physical Development Strategy*)
- b) Strategi pengembangan dunia usaha (*Business Development Strategy*)
- c) Strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development Strategy*)
- d) Strategi pengembangan masyarakat (*Community Based Development Strategy*)

Arsyad (1999:120-121) menjelaskan terdapat empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu *entrepreneur*, bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis terutama mengelola secara ekonomis aset-aset daerah; *coordinator*, bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya; *facilitator*, bertindak sebagai fasilitator untuk mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan di daerahnya; *stimulator*, bertindak sebagai pendorong bagi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah. Aspek lain yang juga harus turut didorong adalah sebagai berikut :

- a) Pertumbuhan pada sektor-sektor ekonomi yang telah *leading* dalam kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB
- b) Pertumbuhan seluruh sektor ekonomi sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi yang berimbang (*balanced growth*)
- c) Pertumbuhan produksi pada sektor ekonomi strategis, dalam pengertian banyak terkait dengan sektor-sektor lainnya (saling ketergantungan antar sektor). Hal ini merupakan bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi yang tidak berimbang (*unbalanced growth*). Dari pengenalan saling ketergantungan antar sektor (*sectoral linkages*) ini dapat diketahui ciri-ciri sektor dalam kemampuan menghasilkan produksi, PDRB, dan *employment regional*, yaitu (1) *backward linkages*; (2) *forward linkages*; (3)

*indirect backward linkages*; (4) *indirect forward linkages*; (5) *output multiplier*; dan (6) *employment multiplier*.

- d) Memberikan prioritas pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berorientasikan ekspor (antar daerah dan internasional). Hasil pengembangan ini kemudian akan berdampak positif terhadap sektor-sektor yang produknya digunakan sendiri oleh masyarakat.

Suatu sektor dikatakan sebagai basis ekonomi jika kegiatan di sektor tersebut mampu mengekspor barang dan jasa ke luar daerah perekonomian atau menjual kepada daerah-daerah yang datang dari luar perekonomian yang bersangkutan. Sektor basis berperan sebagai faktor penggerak utama, karena setiap perubahan dalam aktivitas perekonomian tersebut menimbulkan dampak pengganda (*multiplier*) terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

## **6. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pengembangan daerah merupakan upaya terpadu yang menggabungkan dimensi kebijakan pengembangan masyarakat, perwujudan pemerintah yang baik, integrasi ekonomi antar wilayah dan keterkaitan ekonomi global, pelayanan regional dan lokal, pengelolaan pertanahan dan tata ruang, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, serta penanganan secara khusus daerah-daerah yang mempunyai masalah sosial, ekonomi dan politik yang serius. Soemarno (2000:29) dalam Liling (2006:17) menyebutkan bahwa untuk mendorong pembangunan daerah langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :



- a) Melokalisasi strategi pengembangan fisik (*Locality of Physical Development Strategy*)
- b) Strategi pengembangan dunia usaha (*Business Development Strategy*)
- c) Strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development Strategy*)
- d) Strategi pengembangan masyarakat (*Community Based Development Strategy*)

Arsyad (1999:120-121) menjelaskan terdapat empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu *entrepreneur*, bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis terutama mengelola secara ekonomis aset-aset daerah; *coordinator*, bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya; *facilitator*, bertindak sebagai fasilitator untuk mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan di daerahnya; *stimulator*, bertindak sebagai pendorong bagi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah. Aspek lain yang juga harus turut didorong adalah sebagai berikut :

- a) Pertumbuhan pada sektor-sektor ekonomi yang telah *leading* dalam kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB
- b) Pertumbuhan seluruh sektor ekonomi sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi yang berimbang (*balanced growth*)

- c) Pertumbuhan produksi pada sektor ekonomi strategis, dalam pengertian banyak terkait dengan sektor-sektor lainnya (saling ketergantungan antar sektor). Hal ini merupakan bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi yang tidak berimbang (*unbalanced growth*). Dari pengenalan saling ketergantungan antar sektor (*sectoral linkages*) ini dapat diketahui ciri-ciri sektor dalam kemampuan menghasilkan produksi, PDRB, dan *employment regional*, yaitu (1) *backward linkages*; (2) *forward linkages*; (3) *indirect backward linkages*; (4) *indirect forward linkages*; (5) *output multiplier*; dan (6) *employment multiplier*.
- d) Memberikan prioritas pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berorientasikan ekspor (antar daerah dan internasional). Hasil pengembangan ini kemudian akan berdampak positif terhadap sektor-sektor yang produknya digunakan sendiri oleh masyarakat.

Suatu sektor dikatakan sebagai basis ekonomi jika kegiatan di sektor tersebut mampu mengekspor barang dan jasa ke luar daerah perekonomian atau menjual kepada daerah-daerah yang datang dari luar perekonomian yang bersangkutan. Sektor basis berperan sebagai faktor penggerak utama, karena setiap perubahan dalam aktivitas perekonomian tersebut menimbulkan dampak pengganda (*multiplier*) terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Dalam menyusun strategi pembangunan pada tingkat daerah maupun nasional, secara konseptual dan operasional sebaiknya strategi

tersebut dibedakan dalam empat aspek, yaitu: strategi makro, strategi sektoral, strategi wilayah dan strategi pemilihan proyek-proyek.

Secara wilayah strategi harus dilakukan suatu daerah dan tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh suatu negara. Ada beberapa batasan-batasan maupun manfaat dari penyusunan program pembangunan suatu daerah dalam suatu negara. Hal tersebut ditujukan untuk menunjukkan (1). Berbagai batasan-batasan yang dihadapi oleh suatu daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunannya dan (2) peranan yang dapat dijalankannya dalam rencana pembangunan daerah yang diciptakan dan campur tangan Pemerintah Daerah dalam pembangunan untuk mempercepat lajunya pembangunan itu dan memperbesar peranan daerah dalam usaha pembangunan nasional.

Terdapat beberapa perbedaan penting diantara perekonomian nasional yang menyebabkan strategi pembangunan daerah dan berbagai langkah-langkah untuk melaksanakannya di dalam usaha untuk menciptakan pembangunan daerah menjadi berbeda dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pada garis besarnya perbedaan tersebut dapat dibedakan dalam dua golongan yaitu:

- a) Perbedaan-Perbedaan yang ditimbulkan oleh kenyataan bahwa suatu perekonomian daerah adalah lebih terbuka dari perekonomian nasional.
- b) Perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan oleh terbatasnya kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menjalankan berbagai tindakannya.

Perekonomian daerah dikatakan lebih terbuka dari perekonomian nasional karena mobilitas faktor-faktor produksi dan kegiatan perdagangan diantara daerah tersebut dengan daerah lainnya di negara tersebut adalah lebih bebas dari yang terjadi diantara berbagai negara. Modal dan tenaga kerja dapat berpindah dengan sangat mudah diantara suatu daerah dengan daerah lainnya, tetapi diantara berbagai negara terdapat beberapa hambatan yang diciptakan oleh negara-negara tersebut yang membatasi kemerdekaan modal dan tenaga kerja untuk bergerak dari suatu negara ke negara lainnya. Hal yang sama terjadi dalam perdagangan yaitu diantara berbagai daerah pada umumnya prosedurnya lebih mudah dan pembatasan-pembatasannya sangat minimal sekali, sedangkan diantara berbagai macam sekatan dalam bentuk tarif dan bea masuk atau *quota import*. (Aryad, 1999)

Ada empat strategi pembangunan ekonomi daerah, yaitu:

1. Strategi Pengembangan Fisik atau Lokalitas

Tujuan strategi pengembangan fisik atau lokalitas ini adalah untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona (*amenity base*) atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota (*city centre*) dalam upaya untuk memperbaiki dunia usaha daerah.

Alat tujuan untuk mencapai tujuan pengembangan fisik atau nlokalitas daerah ini mencakup antara lain:

- a) Pembuatan bank tanah (*land banking*)
- b) Pengendalian perencanaan dan pembangunan

- c) Penataan Kota (*townscaping*)
- d) Pengaturan tata ruang (*zoning*)
- e) Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik akan berpengaruh positif bagi dunia usaha
- f) Penyediaan infrastruktur seperti: sarana air bersih dan listrik

## 2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha

Komponen terpenting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. (Aryad, 1999)

Alat untuk mengembangkan dunia usaha ini antara lain:

- a) Penciptaan iklim usaha yang baik
- b) Pembuatan pusat informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dunia usaha
- c) Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil
- d) Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomi dalam produksi
- e) Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang).

## 3. Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan aspek yang terpenting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena peningkatan kualitas dan ketrampilan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan. (Aryad, 1999)

Pengembangan kualitas sumberdaya manusia ini antara lain:

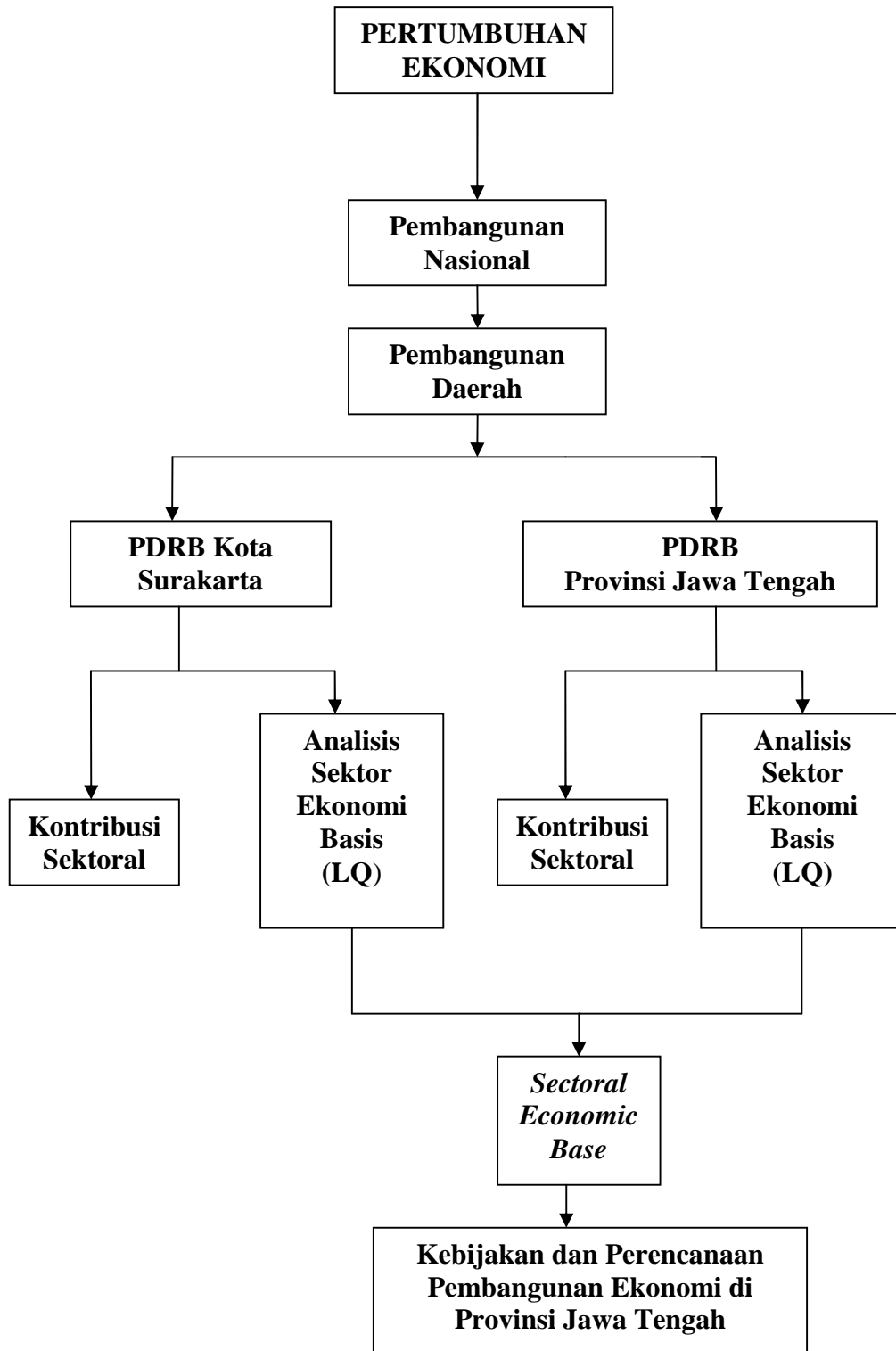
- a) Pelatihan dengan sistem *customized training*
  - b) Pembuatan bank keahlian (*skill bank*)
  - c) Penciptaan iklim yang mendukung bagi perkembangannya lembaga-lembaga pendidikan dan ketrampilan (LPK) di daerah.
  - d) Pengembangan lembaga pelatihan bagi penyandang cacat.
4. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah. Kegiatan ini berkembang di Indonesia belakangan ini karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang ada tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Misalnya melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau memperoleh keuntungan dari usahanya. (Aryad, 1999).

## **B. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, dengan melihat data PDRB dan PDB maka dapat diketahui beberapa sektor yang dikategorikan sebagai sektor basis dan non basis. Selain itu dapat diketahui sektor ekonomi base yang dapat dikembangkan dalam jangka waktu tertentu untuk kemajuan dan peningkatan pendapatan daerah.

Secara sederhana kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut :



Gambar 2. 1

**Kerangka Analisis *Economic Base* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

**Keterangan :**

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pembangunan ekonomi baik secara nasional maupun regional atau kewilayahan. Hal tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berawal dari pembangunan daerah maka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal dapat tercapai. Oleh karena itu perlu diadakan penganalisaan terhadap sektor-sektor yang patut untuk dikembangkan. Langkah yang ditempuh antara lain dengan menganalisis produk domestik regional bruto (PDRB) pada wilayah tersebut. Dalam penelitian ini berarti PDRB dari kota Surakarta yang mempunyai sektor unggulan untuk meningkatkan pembangunan di propinsi Jawa Tengah.

Produk domestik regional bruto ini terdiri dari 9 (sembilan) sektor yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalan; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa. Berdasarkan sektor-sektor yang ada pada PDRB tersebut maka dapat dihitung seberapa besar kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB dengan menggunakan metode kontribusi sektoral, dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) yang selanjutnya dapat dihitung pula sektor-sektor unggulannya yang diakibatkan oleh aktivitas sektor basis tersebut.

Pada akhirnya hasil analisis sektor-sektor unggulan di Kota Surakarta ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat kebijakan dan perencanaan regional dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi di



Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal. Jika pembangunan tersebut dapat tercapai maka secara langsung maupun tidak langsung pertumbuhan ekonomi secara nasional dapat terwujud.

### **C. Hasil Penelitian Sebelumnya**

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (dengan hasil penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda) sebagai dasar penulis dalam penulisan skripsi, terdapat hasil penelitian yang menjadi dasar pengembangan penelitian di Kota Surakarta.

Hasil penelitian Suyatno (2000) menyatakan bahwa kondisi Daerah Tingkat II Wonogiri menunjukkan adanya nilai statis dengan indikasi sektor unggulan pada sektor keuangan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertanian, sektor persewaan dan jasa usaha serta sektor jasa-jasa. Dan reposisi pada sektor basis terjadi disektor pengangkutan dan komunikasi, sementara sektor yang lain masih dipertahankan dan diharapkan dapat unggul dikemudian hari.

Dari penelitian Lilis Siti Badriyah (2003) yang berjudul “Identifikasi Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Di Propinsi Jawa Tengah” menghasilkan bahwa perubahan struktur ekonomi yang mengarah pada transformasi industri telah memberikan dampak yang menguntungkan dalam keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) maupun keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dalam perekonomian Jawa Tengah yang ditunjukkan oleh menyebarnya sektor unggulan dan potensial pada sektor pertanian dan non

pertanian: sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan di Jawa Tengah secara keseluruhan terdiri dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor yang potensial terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air minum, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sedangkan sektor yang unggul tetapi cenderung menurun adalah sektor jasa-jasa.

Hasil penelitian Catur Sugiyanto (2007) menyatakan bahwa Metode penentuan komoditas unggulan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sering tidak sinkron dengan analisis kelayakan unit usaha yang dilakukan oleh dunia perbankan. Oleh karena itu, sinkronisasi diperlukan agar dunia perbankan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah. Data yang lengkap mengenai kinerja sektor atau produk unggulan dimasa lalu akan sangat mendukung pemilihan sektor atau produk unggulan. Serta kelengkapan basis data merupakan kunci pengembangan komoditas unggulan daerah.

Hasil penelitian dari Harun Joko Prayitno bersama Team (2000), penelitian tersebut berjudul “Study Tentang Potensi, Prospek dan Strategi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo”. Penelitian tersebut mengkaji secara luas mengenai masalah-masalah di semua bidang yang dapat menunjang kemajuan maupun kemunduran Kabupaten Sukoharjo.

Hasil penelitian dari Prapto Yuwono (1999) tentang sektor unggulan daerah dengan studi kasus Daerah Tingkat II Salatiga, ditunjukkan adanya nilai statis di tahun 1996. Terdapat beberapa sektor yang dapat menjadi unggulan

dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah yaitu di sektor persewaan dan jasa usaha, sektor keuangan, sektor listrik dan air bersih, serta sektor-sektor jasa. Jika dilihat dari Dynamic Location Quotients (DLQ) sektor yang dapat diunggulkan yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian.

Sedangkan menurut hasil penelitian Suharyaningtyaswati (2002) kondisi Daerah Tingkat II Kendal menunjukkan adanya nilai statis dengan indikasi sektor unggulan dimana keunggulan sektoral maupun potensi wisata yang ada menjadi sumber pemasukan bagi daerah dan dapat meningkatkan pendapatan daerah, juga berdasarkan hasil Indeks Total Keunggulan Daerah (ITKD) secara keseluruhan sektor usaha yang ada di Kabupaten Kendal diyakini dapat bersaing Sri Rahayu & Daryono Soebagiyo. 2004. Analisis *Export Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Periode 1997-2001*. Provinsi Jawa Timur adalah satu-satunya provinsi di Pulau Jawa bagian timur. Usaha pemulihan ekonomi pascakrisis nampaknya belum banyak membawa hasil, terbukti pada tahun 2000 hanya tumbuh sebesar 3,25%, sementara tahun 2001 hanya sebesar 3,34%. Dengan melihat pertumbuhan di dua tahun tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pemulihan yang dilakukan di Jawa Timur perlahan-lahan mulai menampakkan peningkatan. Sungguhpun hampir semua sektor mengalami kenaikan, namun secara keseluruhan kenaikan tersebut belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang signifikan, penyebabnya adalah sektor-sektor yang mengalami andil besar dalam pembentukan PDRB masih mengalami kenaikan relatif kecil, yaitu sektor industri pengolahan, sektor

perdagangan hotel dan restoran, serta sektor pertanian (BPS Provinsi Jawa Timur, 2001: 440 dalam Sri Rahayu & Daryono S). Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari angka PDRB atas dasar harga konstan 1993 selama periode 1997-2001 dapat diketahui sektor basis di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ). Sektor-sektor di Provinsi Jawa Timur yang dapat bersaing di Indonesia berdasarkan koefisien LQ adalah:

1. Sektor listrik, gas dan air bersih.
2. Sektor perdagangan, hotel dan restoran
3. Sektor jasa-jasa
4. Sektor pertanian
5. Sektor pengangkutan dan komunikasi

Hasil penelitian Meinawati (2008) yang berjudul Analisis Exsport Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kab/Kota Propinsi DIY Periode Pasca Krisis Ekonomi 2000-2006 menyatakan bahwa Kontribusi yang diberikan oleh tiap-tiap sektor dari masing-masing wilayah berbeda-beda. Hal ini tergantung dari sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Berdasarkan urutan besarnya rata-rata kontribusi, pada periode 2000-2006 Kabupaten Kulon Progo masih didominasi oleh sektor pertanian; jasa-jasa; perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan. Kabupaten Bantul didominasi oleh sektor pertanian; industri pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran; dan jasa-jasa. Kabupaten Gunung Kidul didominasi oleh sektor pertanian; perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa serta sektor industri pengolahan. Hal yang membedakan wilayah ini dengan

dua kabupaten/kota lainnya adalah bahwa proporsi yang diberikan oleh sektor pertanian dapat dikatakan sangat dominan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Sleman didominasi oleh perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa; pertanian serta sektor industri pengolahan. Kota Yogyakarta didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa; penguatan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan untuk tingkat di atasnya yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pembentukan PDRB didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran; pertanian; jasa-jasa serta sektor industri pengolahan. Selama periode 2000-2006, besarnya perubahan atau peningkatan kegiatan sektor basis dengan nilai tertinggi sebesar 2 (dua) di Kabupaten Gunung Kidul. Sementara itu, pada tahun-tahun yang lain nilainya adalah tetap yaitu 1 (satu). Sedangkan perubahan atau peningkatan kegiatan ekonomi non basis masih ada yang mengalami fluktuasi. Akan tetapi perubahan kegiatan ekonomi sektor basis yang tetap tersebut telah berpengaruh positif terhadap perubahan kegiatan ekonomi sektor non basis. Terbukti pada tahun 2001 perubahan kegiatan ekonomi sektor non basis di Kabupaten Kulon Progo menjadi paling tinggi dibanding tahun-tahun yang lainnya. Sedangkan perubahan ekonomi total di Kabupaten Kulon Progo juga mengalami peningkatan sebagai akibat dari peningkatan kegiatan ekonomi non basis. Besarnya peningkatan kegiatan ekonomi total ini adalah sebesar *multiplier*nya. Besarnya tingkat kebocoran pendapatan menunjukkan besarnya kemampuan suatu wilayah untuk mengekspor produknya ke daerah lain (di luar wilayah). Semakin tinggi persentase kebocoran pendapatan

menunjukkan semakin besar produk yang diekspor ke luar daerah setelah mampu memenuhi kebutuhan di wilayah itu sendiri. Kemampuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan di daerahnya ditunjukkan oleh persentase tingkat pendapatan yang tetap berada di wilayah tersebut.

Sri Susilo Y & Budiono Sri Handoko. 2002. Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kinerja Sektor Industri: Pendekatan Model Keseimbangan Umum Terapan INDORANI. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, krisis tersebut merupakan *shock* yang berdampak pada sektor-sektor lain dalam perekonomian. Dalam tulisan ini akan dibahas dampak krisis ekonomi terhadap industri skala besar, sedang, kecil dan skala rumah tangga dengan pendekatan model Keseimbangan Umum Terapan (KUT) INDORANI. Hasil simulasi menunjukkan bahwa krisis ekonomi menyebabkan secara umum kinerja sektor industri mengalami penurunan. Krisis ekonomi juga berdampak negatif terhadap kinerja ekspor sektor industri. Hasil simulasi menunjukkan bahwa hampir seluruh sektor industri mengalami penurunan ekspor, sedangkan yang mengalami kenaikan adalah produk dari sektor industri makanan dan minuman (IBS 20,25% dan IKRT 10,78%), industri kayu lapis IBS (10,12%), industri pengolahan kayu (IBS 8,56% dan IKRT 12,98%), industri kertas (IBS (45,24%). Selanjutnya, hasil simulasi dari kinerja sektor industri dilihat dari indikator produksi untuk pasar domestik menunjukkan bahwa krisis ekonomi menyebabkan produksi domestik oleh sektor industri hampir seluruhnya mengalami penurunan, kecuali untuk penjualan produk dari industri pupuk (IBS dan IKRT), industri tekstil dan produk tekstil IBS, industri pengolahan kayu IKRT, industri

kertas (IBS), dan industri pestisida IBS. Dalam hal kesempatan kerja, seluruh sektor industri mengalami penurunan akibat adanya krisis ekonomi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan kesempatan kerja berkisar antara 10% sampai dengan 58%. Melihat hasil simulasi dan pengolahan data empiris BPS maka diperoleh gambaran umum adanya kecenderungan bahwa industri-industri (IBS) yang masih bertahan dimasa krisis adalah industri-industri yang berbasis sumberdaya domestik (*resources base*) dan atau berorientasi ekspor (*export oriented*).

Harimurti dalam Liling (2006:41), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Transformasi Struktural dan Basis Ekonomi Daerah di Kabupaten Karanganyar” mendapatkan hasil bahwa telah terjadi pergeseran basis ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier antara kurun waktu 1993-1998. Berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) terlihat bahwa sektor pertanian tidak lagi menjadi basis ekonomi perekonomian Kabupaten Karanganyar karena nilai LQ yang lebih kecil dari satu. Sementara itu sektor industri pengolahan dan jasa-jasa semakin besar peranannya dalam mengangkat perekonomian Kabupaten Karanganyar. Hal itu juga ditunjukkan dengan nilai LQ yang lebih dari 1 (satu) dan terus mengalami peningkatan antara kurun waktu 1993-1998. Dari perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) terlihat bahwa sektor ekonomi yang potensial di Kabupaten Karanganyar adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, gas dan air minum; perdagangan, hotel dan restoran dan jasa-jasa. Laju pertumbuhan sektor-

sektor ekonomi tersebut di wilayah studi lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah referensi (Jawa Tengah).

#### **A. Hipotesis**

1. Yang menjadi sektor basis pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta adalah sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan; sektor persewaan dan jasa perusahaan; sektor jasa.
2. Tingkat laju pertumbuhan sektor basis dalam pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta mengalami perkembangan dibandingkan tingkat laju pertumbuhan sektor lain terhadap PDRB di daerah himpunannya (di Propinsi Jawa Tengah).
3. Faktor lokasional merupakan penyebab reposisis sektoral dalam pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta adalah dari keunggulan lokasional.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### **A. Obyek Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian berusaha mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu obyek dengan menggunakan pedoman semua teori yang ada kaitannya dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data yang jelas. Penelitian ini bersifat eksploratif.

#### **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian terhadap pertumbuhan Kota Surakarta guna meningkatkan pembangunan di Propinsi Jawa Tengah yang diukur melalui PDRB dimana kurun waktu yang digunakan dibatasi mulai periode 2000-2005.

#### **C. Data dan Sumber Data**

Data sekunder dan data yang disusun secara time series yaitu dari kurun waktu 2000-2005. Selain itu diperoleh dari daftar pustaka yang bersumber dari buku-buku pegangan dan instansi-instanti pemerintah yaitu:

- a) Kantor Biro Pusat Statistik Kota Surakarta.
- b) Kantor Biro Pusat Statistik di Propinsi Jawa Tengah yaitu di Semarang.
- c) Instansi-instanti lain yang terkait.

Data yang digunakan antara lain :

- a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota di Surakarta berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2000 dari tahun 2000-2005 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah.
- b) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Surakarta atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2000 dari tahun 2000-2005 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah.
- c) Produk Domestik Bruto (PDB) Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 2000 dari tahun 2000-2005 yang dinyatakan dalam miliar rupiah.

#### **D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### a. Variabel yang diteliti

Variabel yang akan diteliti adalah semua sektor usaha yang ikut andil dalam pertumbuhan perekonomian di Kota Surakarta yaitu terdapat sembilan sektor usaha yang meliputi:

##### 1) Sektor pertanian

Meliputi tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, serta perikanan.

##### 2) Sektor pertambangan dan penggalian

Meliputi minyak gas dan bumi, pertambangan non migas dan penggalian.

##### 3) Sektor industri pengolahan

Meliputi industri migas dan non migas

- 4) Sektor listrik, gas dan air bersih  
Meliputi listrik, gas dan air bersih
- 5) Sektor bangunan
- 6) Sektor perdagangan , hotel dan restoran
- 7) Sektor pengangkutan dan komunikasi
- 8) Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
- 9) Sektor jasa-jasa

b. Definisi Operasional Variabel

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkatan pertambahan penduduk. Laju pertumbuhan ekonomi harus dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk, karena pada dasarnya laju pertumbuhan ekonomi harus dinikmati oleh penduduk. Dimana laju pertumbuhan ekonomi tidak akan dapat dinikmati oleh penduduk jika laju pertumbuhan penduduk jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto sangat berpengaruh terhadap perbaikan tingkat perekonomian rakyat. Hal ini terbukti dengan adanya PDRB per kapita yang merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. PDRB perkapita dapat dihitung atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, pendapatan perkapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian disuatu wilayah.

Perkembangan pendapatan perkapita di Kota Surakarta atas dasar harga berlaku menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2001 pendapatan perkapita masih mencapai angka sebesar 6.028.761, 70 rupiah, tahun 2005 sudah menjadi 10.453.952,56 rupiah atau naik sebesar 53%. (Sumber: Pendapatan Regional Kota Surakarta Tahun 2005)

Demikian juga pendapatan perkapita atas dasar harga konstan, dalam kurun 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak sebesar harga berlaku. (PDRB, Kota Surakarta 2000-2001; Pendapatan Regional Kota Surakarta Tahun 2005).

#### 1. Produk Domestik dan Produk Regional

Seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah domestik tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah tersebut, merupakan produk domestik region yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah domestik atau regional adalah meliputi wilayah yang berada di dalam wilayah geografis regional tersebut.

Kondisi yang sebenarnya menunjukkan bahwa sebagian faktor produksi di suatu wilayah lain. Demikian sebaliknya, faktor produksi yang dimiliki wilayah tersebut ikut pula dalam proses produksi di wilayah lain. Dengan kata lain, Produk Domestik Bruto (PDRB) menunjukkan gambaran "*Production Originated*". Hal ini menyebabkan nilai produksi domestik yang timbul di suatu wilayah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk wilayah

tersebut. Dengan adanya arus pendapatan (pada umumnya berupa upah atau gaji, deviden, dan keuntungan) yang mengalir antar wilayah ini (termasuk dari atau ke luar negeri), maka timbul perbedaan antara produk domestik dengan produk regional.

Produk regional adalah produk domestik ditambah pendapatan dari luar wilayah dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar wilayah tersebut. Dengan kata lain, produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut. Perhitungan PDRB di dekati dengan tiga cara, yaitu:

a) Pendekatan produksi

Adalah sejumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

b) Pendekatan Pendapatan

Adalah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah atau gaji, sewa tanah, bunga, modal dan keuntungan, sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

c) Pendekatan Pengeluaran

Adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor luar negeri, dan sektor pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

## 2. Agregat PDRB

Agregat PDRB Yang dapat dilihat disini adalah:

### a) PDRB atas dasar harga yang berlaku

PDRB atas dasar harga yang berlaku adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang di nilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

### b) PDRB atas harga konstan

PDRB atas harga konstan adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap (harga pada tahun dasar) yang digunakan selama satu tahun.

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Jumlah (Juta Rp)	Perkemb.	Jumlah (Juta Rp)	Perkemb.
2000	2.990.464,31	100,00	2.990.464.31	100,00
2001	3.372.850,36	112,79	3.113.668.99	104,12
2002	3.772.737,68	126,16	3.268.559.64	109,30
2003	4.251.548,59	142,18	3.468.276,94	115,98
2004	4.756.559,53	159,06	3.669.373,45	122,70
2005	5.585.776,84	186,79	3.858.169,67	129,02

Tabel 3 . 1

Sumber: Pendapatan Regional Kota Surakarta Tahun 2005

## E. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data persektor usaha yang ada, dipergunakan data-data laju pertumbuhan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdapat tiga tahap untuk menganalisis data yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis variabel-variabel tersebut dan untuk mengetahui lebih lanjut sektor basis digunakan rumusan model matematis yaitu dengan perbandingan antara pangsa sektor suatu daerah dengan pangsa sektor di daerah himopunannya, yang disebut metode *location quotiens*. Location quotiens adalah usaha untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan dalam peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. (Lincoln Arsyad, 1999, Metode tersebut sebagai berikut (Richardson, 1985: John Glasson, Pengantar Perencanaan Regional, FE-UI:67):

$$LQ = \frac{X_{in} / Y_n}{X_i / Y}$$

Keterangan:

LQ = Location Quotiens

$X_{in}$  = nilai tambah sektor I di daerah n

$X_i$  = nilai tambah sektor I di daerah himpunan

$Y_n$  = jumlah seluruh PDRB didaerah n

$Y$  = jumlah seluruh PDRB di daerah himpunan.

Dengan formulasi sebagai berikut:

- Apabila  $LQ = 1$ , berarti semua permintaan dari daerah lain akan output suatu sektor dapat dipenuhi oleh oleh sektor tersebut di daerah maupun daerah himpunan.
- Apabila  $LQ < 1$ , berarti suatu sektor di daerah belum mampu memenuhi permintaan dari daerah itu sendiri sehingga masih harus mengimpor dari daerah lain.

- Apabila  $LQ > 1$ , berarti kedudukan suatu sektor di daerah memiliki arti penting sebab mampu melakukan ekspor sehingga disebut sebagai sektor unggulan.

Menurut Yuwono, nilai LQ ini bersifat statis dan hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu. Maksudnya, bahwa sektor unggulan tahun sekarang belum tentu akan menjadi sektor unggulan diwaktu yang akan datang. Demikian juga sebaliknya, sektor yang tidak unggulan sekarang kemungkinan akan menjadi sektor unggulan diwaktu yang akan datang.

- 2) Penggunaan varians dari LQ yang disebut Dynamic Location Quotients (DLQ) digunakan untuk mengetahui reposisi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu mengintroduksi laju pertumbuhan dengan perkiraan bahwa setiap nilai tambah per sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan per tahun selama kurun waktu antara tahun awal dan tahun per jarak dengan formulasi berikut (Richardson, 1985: John Glason, Pengantar Perencanaan Regional, FE-UI:67):

$$LQ = \left\{ \frac{X_{ino}(1+g_{in})t / Y_{no}(1+g_n)t}{X_{io}(1+G_1)t / Yo(1+G)t} \right\}$$

Persaman diatas dapat mengalami berubah jika awalnya diasumsikan  $X_{in}/Y_{no}=X_{io}/Y_o$ , maka (Prpto Yuwono, 1999, Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU 22/1999 DAN UU 25/1999 (Studi Kasus Dati II Salatiga):53):

$$DLQ = \left\{ \frac{(1+G_{in})/(1+g_n)}{(1+G_1)/(1+G)} \right\}_t$$



Keterangan:

$g_{in}$  = Laju pertumbuhan per sektor di daerah.

$g_i$  = Laju pertumbuhan per sektor di daerah himpunan.

$g_n$  = Total pertumbuhan per sektor di daerah.

$G$  = Total pertumbuhan per sektor di daerah himpunan.

$t$  = Tahun

Keterangan tersebut disesuaikan dengan data yang akan diteliti menjadi:

$g_{in}$  = Laju pertumbuhan per sektor di daerah Kota Surakarta.

$G_i$  = Laju pertumbuhan per sektor di Propinsi Jawa Tengah.

$g_n$  = Total pertumbuhan per sektor di daerah Kota Surakarta.

$G$  = Total pertumbuhan per sektor di Propinsi Jawa Tengah.

$t$  = Tahun

Dengan kriteria yang sama dengan LQ, maka formulasi dari DLQ adalah sebagai berikut:

- Apabila  $DLQ = 1$ , maka dapat dinyatakan bahwa proporsi laju pertumbuhan sektor (I) terhadap laju pertumbuhan PDRB di daerah (n) sebanding dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut dengan laju pertumbuhan PDRB di Propinsi Jawa Tengah.
- Apabila  $DLQ > 1$ , maka dapat dinyatakan sebagai bahwa proporsi laju pertumbuhan sektor (I) terhadap laju pertumbuhan PDRB di daerah (n) lebih cepat bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor tersebut dengan laju pertumbuhan PDRB di Propinsi Jawa Tengah.

- Apabila  $DLQ < 1$ , maka dapat dinyatakan sebagai bahwa proporsi laju pertumbuhan sektor (I) terhadap laju pertumbuhan PDRB di daerah (n) lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor tersebut dengan laju pertumbuhan PDRB di Propinsi Jawa Tengah.

3) Tahapan-tahapan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya reposisi sektoral terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah sebagai indikator bagi daerah bagian mempertahankan agar laju pertumbuhan PDRB daerah tidak sampai terkalahkan dengan laju pertumbuhan PDRB daerah himpunan digunakan tahap-tahap sebagai berikut (Prpto Yuwono, 1999, Penentuan sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU 22/1999 dan UU 25/1999 (Studi Kasus Dati II Salatiga):54):

$$ITKD = (g_n - G) \dots \dots \dots (i)$$

Keterangan ITKD:

- ITKD = indeks total keunggulan daerah
- $g_n$  = laju pertumbuhan PDRB daerah
- G = laju pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Tengah yang mewakili rata-rata laju pertumbuhan PDRB dari seluruh daerah bagian.

Kriteria ITKD:

- Apabila  $ITKD > 0$ , maka dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan laju pertumbuhan sektoral daerah (Kota Surakarta) memenangkan persaingan dengan daerah lainnya di Propinsi Jawa Tengah.

- Apabila  $ITKD < 0$ , maka dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan laju pertumbuhan sektoral daerah (Kota Surakarta) kalah saing dengan daerah lainnya di Propinsi Jawa Tengah.

Dari keunggulan daerah secara total diatas, dapat diketahui keuntungan yang akan diperoleh daerah bagian. Maka perbandingan daerah bagian dengan laju yang sama dengan daerah himpunan, yaitu dengan mengalikan ITKD dengan PDRB daerah bagian yang disebut dengan *Total Shift Share* (TSS).

$$TSS = (g_n - G) Y_{no} \dots\dots\dots(ii)$$

Dari persamaan (ii) dapat diuraikan dengan memasukkan  $g_{in}$  dan  $G_{in}$  yang kemudian ditambahkan pada semua sektor yang ada, sehingga menjadi rumusan sebagai berikut (Prapto Yuwono, 1999, Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU 22/1999 dan UU 25/1999 (Studi Kasus Dati II Salatiga):55):

$$TSS = \sum (g_n - g_{in}) X_{mo} + \sum (G_1 - G) X_{mo} + \sum (g_{in} - G_1) X_{mo} \dots\dots\dots(iii)$$

Dengan  $\sum (g_1 - G) X_{mo} - \sum (g_n - g_{in}) X_{mo}$  adalah *struktural shift share* (SSS) dan  $\sum (g_n - G_1) X_{ino}$  adalah *Location Shift Share* (LSS). Structural Shift Share yaitu merupakan perbedaan laju pertumbuhan PDRB suatu daerah bagian dengan daerah himpunan yang terjadi karena perbedaan pangsa sektoral, walaupun laju pertumbuhan sektoral daerah tepat sama. Kemudian *Location Shift Share* (LSS) yaitu mengukur perbedaan pangsa sektoral, walaupun laju pertumbuhan sektoral, walaupun pangsa sektoralnya tetap sama (Prapto Yuwono, 1999).

Penentuan Sektoral Uynggulan Daerah Mengahdapi Implementasi UU  
22/1999 dan UU 25/1999 (Studi Kasus Dati II Salatiga): 57).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Surakarta**

##### **1. Keadaan Geografi Kota Surakarta**

###### **a. Letak**

Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan nama "Kota Sala" merupakan dataran rendah dan berada antara pertemuan sungai Pepe, Jenes dengan Bengawan Solo, yang mempunyai ketinggian  $\pm 92$  m dari permukaan air laut dan terletak antara :

110° 45' 15" - 110° 45' 15" Bujur Timur

7° 36' 00" - 7° 56' 00" Lintang Selatan

Kota Surakarta dibatasi:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.

###### **b. Keadaan Iklim**

1) Suhu udara maksimum 27,6° C, minimum 25,6° C

2) Rata-rata tekanan udara : 1009,8 MBS

3) Kelembaban udara : 71%

4) Kecepatan angin : 4,7 Knot

5) Arah angin : 270 derajat

c. Keadaan Tanah dan Penggunaan Tanah

Wilayah Kota Surakarta secara umum keadaannya datar, hanya bagian utara dan timur agak bergelombang dengan ketinggian kurang lebih 92 meter diatas permukaan air laut.

Jenis tanah sebagian merupakan tanah liat berpasir termasuk regosol kelabu dan alluvial, di wilayah bagian utara tanah liat grumosol serta wilayah bagian timur laut tanah litosol mediteran.

Penggunaan tanah di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1) Perumahan pemukiman	:	2.681 Ha
2) Jasa	:	426,60 Ha
3) Perusahaan	:	282,12 Ha
4) Industri	:	101,42 Ha
5) Tanah Kosong Diperuntukkan	:	60,33 Ha
6) Tegalan	:	97,69 Ha
7) Sawah	:	185,75 Ha
8) Kuburan	:	72,86 Ha
9) Lapangan Olah Raga	:	65,14 Ha
10) Taman Kota	:	31,60 Ha
11) Lain-lain	:	<u>399,44 Ha</u>
Jumlah	:	4.404,06 Ha

(sumber: Kantor BPN Kota Surakarta)

## 2. Keadaan Kependudukan

Keadaan penduduk Kota Surakarta dilihat berdasarkan Pertambahan penduduk, distribusi, kepadatan penduduk, sex ratio dan komposisi penduduk

### a. Pertambahan Penduduk

Berdasarkan data dari kantor statistik Kota Surakarta (Hasil Susenas Th. 2001) jumlah penduduk Kota Surakarta sebesar 553.580 jiwa. Terdiri dari 271.891 jiwa penduduk laki-laki dan 281.689 jiwa penduduk perempuan.

Bila dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2001 (550.251 jiwa), maka didapatkan pertambahan penduduk sebesar 0,6%. Jumlah penduduk terbanyak ada di kecamatan Banjarsari sebesar 162.383 jiwa dan penduduk terkecil ada di kecamatan Serengan 61.756 jiwa.

### b. Kepadatan Penduduk

Luas wilayah kota Surakarta sebesar 44,04 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebesar 553.580 jiwa sehingga didapat kepadatan penduduk sebesar 12.570 jiwa per km<sup>2</sup>. Apabila dibandingkan dengan kepadatan pada tahun sebelumnya sebesar 12.494 jiwa per km<sup>2</sup>, mengalami kenaikan sebesar 0,6%. Kepadatan tertinggi ada pada kecamatan Serengan sebesar 19.335 jiwa per km<sup>2</sup>, dan kepadatan terendah ada pada kecamatan Jeebres 10,878 jiwa per km<sup>2</sup>.

c. Sex Ratio Penduduk

Perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari angka sex ratio, yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Angka sex ratio penduduk tahun 2002 sebesar 97%. Ini berarti bahwa setiap ada 100 orang perempuan maka terdapat 97 orang laki-laki. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Ini merupakan bahan pemikiran khususnya dalam mengantisipasi resiko angka kelahiran dan perencanaan program pemberdayaan perempuan.

d. Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Susunan penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Menurut Gol. Umur dan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2005

Gol. Umur (tahun)	Laki-laki		Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%
0-4	40.682	14,96	41.442	14,71
5-9	27.561	10,14	28.346	10,06
10-14	27.183	10,00	28.203	10,01
15-19	28.475	10,47	29.294	10,40
20-24	29.783	10,95	31.305	11,11
25-29	28.624	10,53	29.266	10,39
30-39	28.856	10,61	30.123	10,69
40-49	25.979	9,55	26.271	9,33
50-59	19.621	7,22	21.644	7,68
>60	15.127	5,56	15.795	5,61
<b>Jumlah</b>	<b>271.891</b>	<b>100</b>	<b>281.689</b>	<b>100</b>

Sumber: Kota Surakarta Dalam Tahun 2005

Berdasarkan komposisi penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin Kota Surakarta tahun 2005 dapat diketahui bahwa



jumlah penduduk untuk kategori jenis kelamin laki-laki didominasi oleh anak dengan usia antara 0-4 tahun yaitu sebesar 40.682 jiwa atau 14,96% dari seluruh penduduk Kota Surakarta yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan angka terendah adalah penduduk dengan usia lebih dari 60 tahun yaitu sebesar 15.127 jiwa atau 5,56% dari seluruh penduduk Kota Surakarta yang berjenis kelamin laki-laki. Komposisi penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebagian besar oleh anak dengan usia antara 0-4 tahun yaitu sebesar 41.442 jiwa atau 14,71% dari seluruh penduduk Kota Surakarta yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan angka terendah adalah penduduk dengan usia lebih dari 60 tahun yaitu sebesar 15.795 jiwa atau 5,61% dari seluruh penduduk Kota Surakarta yang berjenis kelamin perempuan.

e. Pendidikan Penduduk

Salah satu indikator indeks pembangunan manusia adalah tingkat pendidikan penduduk. Untuk kota Surakarta, berdasarkan data dari BPS Kota Surakarta (Susenas 2001), maka banyaknya penduduk menurut pendidikan (umur 5 tahun ke atas adalah sebagai berikut):

Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2005

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Tidak Sekolah	26.829	5,73
2.	Belum tamat SD	90.646	19,35
3.	Tidak Tamat SD	98.017	20,92
4.	Tamat SD	105.686	22,56

5.	Tamat SLTP	54.226	11,58
6.	Tamat SLTA	64.623	13,79
7.	Tamat Akedemi/PT	28.441	6,07
<b>Jumlah</b>		<b>468,468</b>	<b>100</b>

*Sumber: Kota Surakarta Dalam Tahun 2005*

Besarnya jumlah penduduk Kota Surakarta dengan umur lebih dari 5 tahun adalah 84,62% atau 468.468 jiwa. Berdasarkan komposisi penduduk menurut pendidikan berusia lebih dari 5 tahun di Kota Surakarta Tahun 2005 dapat diketahui bahwa 5,73% atau 26.829 penduduk Kota Surakarta tidak sekolah; 11,58% atau 54.226 penduduk Kota Surakarta telah memenuhi program belajar wajib pemerintah 9 tahun yaitu telah tamat SLTP dan untuk selebihnya 64.623 jiwa atau 13,79% tamat SLTA serta 6,07% atau 28.441 jiwa telah tamat Akademi atau Perguruan Tinggi.

f. Mata Pencaharian

Salah satu ukuran untuk mengetahui ekonomi suatu wilayah adalah dengan melihat mata pencaharian. Berdasarkan Susenas penduduk Kota Surakarta Tahun 2001 penyebaran mata pencaharian penduduk dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Mata pencaharian di Kota Surakarta Tahun 2005

No	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1.	Petani sendiri	737	0,19
2.	Buruh Tani	831	0,22
3.	Pengusaha	9.232	2,44
4.	Buruh Industri	69.546	18,37
5.	Buruh Bangunan	59.613	15,74
6.	Pedagang	24.736	6,53
7.	Pengangkutan	17.301	4,57
8.	PNS/ABRI	21.647	5,72

9.	Lain-lain	156.218	41,26
10.	Pensiunan	18.769	4,96
<b>Jumlah</b>		<b>378.630</b>	<b>100</b>

*Sumber: Kota Surakarta Dalam Tahun 2005*

Berdasarkan distribusi mata pencaharian penduduk di Kota Surakarta tahun 2005 diketahui bahwa hanya 68,39% penduduk atau 378.630 jiwa yang mempunyai mata pencaharian. Hasil distribusi tersebut diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota Surakarta bermata pencaharian sebagai buruh industri yaitu sebesar 18,37% atau 69.546 jiwa; sedangkan untuk petani sendiri menduduki peringkat yang paling rendah yaitu hanya 737 jiwa atau 0,19% dari jumlah penduduk di Kota Surakarta yang mempunyai mata pencaharian.

### **3. Keadaan Ekonomi Kota Surakarta**

#### **a. Keadaan Umum**

Secara umum kondisi perekonomian nasional telah mengarah pada kondisi yang lebih baik, meskipun masih diwarnai situasi politik yang belum kondusif. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang ekonomi memberikan tanda kearah perbaikan ekonomi yang lebih baik.

Sejalan dengan kondisi ekonomi nasional, kinerja ekonomi Surakarta tahun 2005 mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,15 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2004 (5,8 persen).

#### **b. PDRB dan Perkembangannya**

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun 2000-2005 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan di Kota Surakarta Tahun 2000-2005

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Jumlah (Juta Rp)	Perkemb.	Jumlah (Juta Rp)	Perkemb.
2000	2.990.464,31	100,00	2.990.464,31	100,00
2001	3.372.850,36	112,79	3.113.668,99	104,12
2002	3.772.737,68	126,16	3.268.559,64	109,30
2003	4.251.548,59	142,18	3.468.276,94	115,98
2004	4.756.559,53	159,06	3.669.373,45	122,70
2005	5.585.776,84	186,79	3.858.169,67	129,02

Sumber: Pendapatan Regional Kota Surakarta Tahun 2005

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa PDRB Kota Surakarta pada tahun 2005 atas dasar harga berlaku sebesar 5.585.776,84 juta rupiah atas dasar harga konstan sebesar 3.858.169,67 juta rupiah, sehingga pada tahun 2004 besaran PDRB Surakarta atas dasar harga berlaku menjadi 86,79% dari tahun 2000 dan PDRB atas dasar harga konstan menjadi 29,02 persenkali.

c. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2000-2005 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2000-2005

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2000	4,16
2001	4,12
2002	4,97
2003	6,11
2004	5,80
2005	5,15

Sumber: Pendapatan Regional Kota Surakarta Tahun 2005

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2000-2005 diketahui bahwa secara agregat cukup dinamis. Sejak terjadinya krisis pertengahan tahun 1997 dan tahun 1998, pertumbuhan ekonomi tahun tersebut menurun drastis sekitar minus 13,93 persen. Namun demikian pada periode 2000 sampai 2005, perekonomian Surakarta menunjukkan adanya perbaikan yaitu tumbuh berkisar antara 4-6 persen.

d. Pertumbuhan Ekonomi di Eks karesidenan Surakarta Tahun 2000-2005

Pertumbuhan ekonomi di Eks karesidenan Surakarta tahun 2002-2005 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.6 Pertumbuhan Ekonomi di Eks karesidenan Surakarta Tahun 2002-2005

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2002	2003	2004	2005
Boyolali	6,68	4,49	2,04	3,76
Klaten	3,46	4,03	4,87	4,31
Sukoharjo	3,58	3,59	4,33	4,09
Wonogiri	3,86	3,17	4,11	4,00
Karanganyar	3,19	3,32	6,45	5,06
Sragen	2,93	3,26	4,93	5,15
Surakarta	4,97	6,11	5,80	5,15

*Sumber: Pendapatan Regional Kota Surakarta Tahun 2005*

Kinerja perekonomian setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang dijelaskan PDRB atas dasar harga konstan 2000, pada tahun 2005 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan rata-rata 5,14 persen. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada Kota Semarang 9,00 persen dan terendah Kabupaten Demak 0,84 persen.

Dari eks karesidenan Surakarta tahun 2005, semua Kabupaten/Kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah pertumbuhan Jawa Tengah (5,35 persen) diantaranya: Kabupaten Wonogiri 4,00 persen, Kabupaten Sragen 5,15 persen dan Kota Surakarta 5,15 persen, Kabupaten Boyolali 3,76 persen, Kabupaten Klaten 4,31 persen, Kabupaten Sukoharjo 4,09 persen dan Kabupaten Karanganyar 5,06 persen.

e. Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Surakarta tahun 2000-2005

Pertumbuhan sektor ekonomi di Surakarta tahun 2000-2005 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.7 Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Surakarta Tahun 2000-2005

Sektor	Tahun					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Pertanian	-1,61	- 11,69	-5,04	- 11,62	-2,37	0,88
Pertambangan	1,90	1,10	7,62	4,45	-0,72	3,34
Industri	3,83	3,82	4,63	6,70	6,07	1,47
Listrik, Gas & Air	4,47	12,32	5,58	0,64	7,61	4,45
Bangunan	2,50	2,72	5,91	7,05	1,44	8,24
Perdagangan, Hotel & Restoran	4,03	3,69	4,31	6,45	8,01	7,58
Pengangkutan & Komunikasi	3,51	2,64	3,36	5,02	6,13	5,48
Keuangan, Persewaan & Js. Perusahaan	7,29	6,07	4,14	3,86	5,65	6,74
Jasa-Jasa	5,10	5,64	8,43	6,98	5,45	4,79

*Sumber: Pendapatan Regional Kota Surakarta Tahun 2005*

Tabel 4.7 menjelaskan laju pertumbuhan seluruh sektor ekonomi pada tahun 2000-2005. Tahun 1998, dimana pada tahun tersebut terjadi puncak krisis ekonomi, hampir semua sektor

mengalami laju pertumbuhan negatif. Dalam tahun 1999 ditandai mulai membaiknya perekonomian, seluruh sektor ekonomi berhasil bangkit dengan laju pertumbuhan positif. Selanjutnya tahun 2000 sampai 2005 seluruh sektor ekonomi sudah menunjukkan pertumbuhan ke arah positif.

Pada tahun 2005, sektor Bangunan mengalami pertumbuhan yang paling besar dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, yaitu sebesar 8,24 persen. Sedangkan sektor pertanian merupakan sektor dengan pertumbuhan terendah yaitu sebesar 0,88 persen.

f. Struktur Ekonomi Surakarta

Pertumbuhan struktur ekonomi di Surakarta tahun 2000-2005 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.8 Pertumbuhan Struktur Ekonomi di Surakarta Tahun 2000-2005

Sektor	Tahun					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Pertanian	0,13	0,10	0,09	0,07	0,07	0,06
Pertambangan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
Industri	29,65	29,22	29,09	28,63	28,10	26,42
Listrik, Gas & Air	2,09	2,56	2,59	2,63	2,70	2,59
Bangunan	11,91	11,76	12,69	12,80	12,68	12,89
Perdagangan, Hotel & Restoran	24,76	24,76	23,00	22,67	22,96	23,82
Pengangkutan & Komunikasi	10,24	10,16	10,40	10,79	10,83	11,52
Keuangan, Persewaan & Js. Perusahaan	9,78	10,14	10,70	10,73	11,14	11,43
Jasa-Jasa	11,38	11,46	11,39	11,62	11,48	11,23

Sumber: Pendapatan Regional Kota Surakarta Tahun 2005

Dalam kurun lima tahun terakhir, sektor industri pengolahan masih merupakan sektor yang menjadi andalan yang terbesar di Kota Surakarta. Hal ini ditandai dengan sumbangannya terhadap total PDRB Kota Surakarta yaitu berkisar di atas 26 persen, paling tinggi dibanding dengan sektor lain.

Selanjutnya yang memberikan sumbangan terbesar setelah sektor industri pengolahan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor bangunan, pada tahun 2005 masing-masing memberikan sumbangan sebesar 23,82 persen dan 12,89 persen. Pertambangan/Penggalian dan Pertanian merupakan sektor yang memberikan sumbangan terkecil yakni hanya sebesar 0,04 persen dan 0,06 persen.

Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang berarti, masing-masing sektor masih dalam posisi yang sama.

g. Pendapatan Per Kapita Surakarta

Pendapatan Per Kapita Surakarta tahun 2000-2005 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.9 Pendapatan Per Kapita Penduduk Kota Surakarta Tahun 2000-2005

Tahun	Pendapatan Per Kapita (Harga Berlaku)		Pendapatan Per Kapita (Harga Konstan)	
	Jumlah	Pertumb.	Jumlah	Pertumb.
2000	5.336.870,05	-	5.336.870,05	-
2001	6.028.762,70	12,96%	5.559.459,37	4,17%
2002	6.764.819,94	12,21%	5.836.923,49	4,99%
2003	7.670.663,97	13,39%	6.191.582,99	6,08%
2004	8.175.131,57	6,58%	6.235.403,94	0,71%



2005	9.223.741,60	12,83%	6.280.764,91	0,73%
------	--------------	--------	--------------	-------

*Sumber: Pendapatan Regional Kota Surakarta Tahun 2005*

Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, pendapatan per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan pendapatan per kapita di Kota Surakarta atas dasar harga berlaku, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 pendapatan per kapita masih mencapai angka sebesar 6.028.761,70 rupiah, tahun 2005 sudah menjadi 10.453.952,56 rupiah atau naik sebesar 53 persen.

Demikian juga pendapatan per kapita atas dasar harga konstan, dalam kurun 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak sebesar harga berlaku.

#### **4. Keadaan Sektoral Kota Surakarta**

Berikut ini adalah gambaran sektoral yang mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing sektor dan sub sektor, metode penghitungan nilai tambah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 serta sumber datanya.

##### **a. Pertanian**

###### **1) Tanaman Bahan Makanan**

Sub sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedele, sayur-sayuran, buah-buahan, kentang, kacang hijau, tanaman pangan lainnya, dan hasil-hasil produk ikutannya.

Data produksi padi dan produksi palawija diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sedangkan data harga bersumber pada data harga yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga berlaku diperoleh dengan pendekatan produksi yaitu dengan cara mengalikan setiap jenis kuantum produksi dengan harga masing-masing komoditi, kemudian hasilnya dikurangi dengan nilai biaya antara atas dasar harga berlaku. Rasio biaya antara diambil dari tabel I-O Jawa Tengah tahun 2000 yang di Update.

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan produksi pada tahun yang dihitung dengan harga pada tahun 2000. Kemudian dikurangi dengan nilai biaya antara atas dasar harga konstan 2000.

## 2) Tanaman Perkebunan

Komoditi yang dicakup adalah hasil tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti karet, kopra, kopi, kapuk, teh, tebu, tembakau, cengkeh dan sebagainya, termasuk produk ikutannya. Data produksi diperoleh dari Dinas Perkebunan Kota Surakarta. Adapun data harga produsen diperoleh dari survey harga perdagangan besar yang dilaksanakan oleh BPS Kota Surakarta.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara pendekatan produksi. Rasio biaya antara rasio margin

perdagangan dan biaya transport menggunakan rasio dari Tabel I-O Jawa Tengah Tahun 2000 yang di update. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan

### 3) Tanaman Perkebunan Besar

Sub sektor ini mencakup semua kegiatan yang dilakukan perusahaan perkebunan berbadan hukum. Komoditi yang dihasilkan kakao/coklat, kapok, karet, kelapa, kopi, dan teh. Data produksi dari Dinas Perkebunan Kota Surakarta dan harga produsen dari BPS Kota Surakarta.

Cara penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 sama seperti yang dilakukan pada tanaman perkebunan rakyat.

### 4) Peternakan dan Hasil-Hasilnya

Sub sektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas, hasil-hasil ternak seperti sapi, kerbau, babi, kuda, kambing, domba, telur dan susu segar. Produksi ternak diperkirakan sama dengan jumlah ternak yang dipotong ditambah perubahan stok populasi ternak dan ekspor ternak neto.

Data ternak, produksi susu dan telur diperoleh dari Dinas Peternakan, sedangkan data ekspor, impor ternak, harga ternak, serta pemotongan dan hasil-hasil ternak diperoleh dari BPS.

Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara mengalikan nilai produksi dengan rasio nilai tambah berdasarkan table I-O Jawa Tengah tahun 2000 yang di Update.

#### 5) Kehutanan

Sub sektor kehutanan mencakup dua jenis kegiatan yakni penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan lainnya. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu gelondongan, kayu bakar, arang dan bambu, sedangkan hasil kegiatan pengambilan hasil hutan lainnya berupa kulit kayu, kopal, akar-akaran dan sebagainya.

Output sektor kehutanan dihitung dengan mengalikan produksi dan harga setiap komoditi. Dengan menggunakan harga pada tahun dasar menghasilkan Output atas dasar harga konstan 2000. Data harga didapat dari Perum Perhutani Jawa Tengah. Nilai tambah bruto dihitung dengan menggunakan rasio nilai tambah terhadap nilai produksi. Rasio tersebut diperoleh dari Tabel I-0 Jawa Tengah tahun 2000 yang diupdate.

#### 6) Perikanan

Komoditi yang dicakup adalah semua hasil perikanan laut, perairan umum, tambak, kolam, sawah dan karamba. Data mengenai produksi, dan output diperoleh dari laporan Dinas Perikanan Kota Surakarta.

Perhitungan nilai tambah bruto dilakukan dengan mengalikan rasio nilai tambah terhadap output, rasio nilai tambah itu diperoleh dari Tabel I-O Jawa Tengah tahun 2000 yang diupdate.

#### **b. Pertambangan dan Penggalian**

Komoditi yang dicakup sektor ini adalah minyak mentah, pasir besi, hasil tambang lainnya serta segala jenis hasil penggalian. Data produksi minyak mentah dan barang-barang tambang lainnya diperoleh dari Laporan Tahunan Dinas Pertambangan dan Energi.

Output merupakan perkalian antara produksi dengan harga masing-masing. Data harga diperoleh dari BPS. Data harga untuk menilai minyak mentah adalah harga ekspor dan harga dalam negeri. Output beberapa jenis penggalian diperoleh diperoleh dari Laporan Data Penunjang yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik. Perkiraan output atas dasar harga konstan 2000 baik untuk pertambangan maupun penggalian dihitung dengan cara revaluasi. Biaya antara masing-masing komoditi diperoleh dengan menggunakan rasio biaya antara terhadap output hasil penyusunan Tabel I-O Jawa Tengah 2000 yang di Update.

#### **c. Industri Pengolahan**

Sektor ini terdiri dari dua sub sektor yaitu industri pengolahan non migas, dan pengilangan minyak bumi, Industri pengolahan non migas dibedakan atas industri besar dan sedang, kecil dan kerajinan rumah tangga.

## 1) Industri Besar Sedang

Ruang lingkup dan metode penghitungan nilai tambah bruto industri besar dan sedang didasarkan pada tenaga kerja yang bekerja di sektor industri. Industri besar mempunyai batasan jumlah tenaga kerja 100 orang ke atas, dan industri sedang antara 20-93 orang.

Metode penghitungan menggunakan pendekatan produksi (*production approach*) yaitu dengan cara menilai produksi yang dihasilkan dari unit industri pengolahan dengan harga produsen.

Output dari nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari Survei Tahunan Besar Sedang dari Badan Pusat Statistik. Persentase biaya antara dan penyusutan diperoleh dari table I-O Jawa Tengah 2000 yang di update. Nilai tambah bruto Industri B/S atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara ekstrapolasi, dimana tenaga kerja sebagai ekstrapolatornya.

## 2) Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga

Nilai tambah bruto industri kecil dan kerajinan rumah tangga diperoleh dengan mengeluarkan biaya antara dari outputnya. Jika penyusutan dikeluarkan dari nilai tambah bruto, didapatkan neto. Persentase biaya antara dan penyusutan menggunakan Tabel I-O tahun 2000 yang di update.

Metode yang digunakan untuk menghitung harga konstan 2000, dengan cara ekstrapolasi dan indeks produksinya adalah tenaga kerja.

#### **d. Listrik, Gas dan Air-Minum**

Data produksi yang disajikan bersumber dari P.T. PLN (Persero) UBD Surakarta dan Perusahaan Air Minum (PAM). Output masing-masing sub sektor mencakup semua produksi yang dihasilkan sesuai dengan ruang lingkup yang dicakup usahanya.

##### **1) Listrik**

Sub sektor ini mencakup produksi dan distribusi listrik, baik yang diusahakan oleh PT PLN (persero), maupun listrik non PLN. Produksi listrik meliputi yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi, dan listrik yang dicuri.

Data produksi, harga biaya antara diperoleh dari PT PLN UBD Surakarta. Output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dari perkalian produksi dan harga berlaku. Output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan revaluasi. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dari rasio NTB terhadap output tahun 2000. Nilai tambah atas dasar harga berlaku menggunakan rasio nilai tambah tahun bersangkutan.

##### **2) Air Minum**

Sub sektor ini yang dicakup adalah kegiatan air minum yang diusahakan oleh Perusahaan Air Minum (PAM). Data

produksi dan harga diperoleh dari PAM Daerah Surakarta, biaya antara dari BPS Propinsi Jawa Tengah.

Perhitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 menggunakan pendekatan revaluasi, dan atas dasar harga berlaku menggunakan rasio nilai tambah dari masing-masing tahun.

**e. Bangunan**

Sektor bangunan mencakup kegiatan pembangunan fisik konstruksi, berupa gedung, jembatan, jalan, terminal, pelabuhan, dam, irigasi, jaringan listrik, air, telepon, dan sebagainya.

Kegiatan bangunan atau konstruksi mencakup kegiatan fisik yang dilakukan di Surakarta, tanpa melihat asal kontraktor. Nilai tambah bruto didapat dari perkalian suatu rasio dengan output tahun berjalan. Rasio tersebut diperoleh dari Tabel I-O Jawa Tengah yang di update. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan metode deflasi dan deflatornya adalah IHPB Bangunan.

**f. Perdagangan, Hotel, dan Restoran**

1) Perdagangan Besar dan Eceran

Penghitungan nilai tambah sub sektor perdagangan Besar dan Eceran dilakukan dengan pendekatan arus barang yaitu dengan cara menghitung besarnya nilai komoditi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri dan impor yang diperdagangkan.

Berdasarkan nilai komoditi yang diperdagangkan dihitung nilai margin perdagangan. Margin perdagangan ini



merupakan output perdagangan dan dipakai menghitung nilai tambahnya. Rasio nilai barang-barang yang diperdagangkan, margin perdagangan, rasio nilai tambah menggunakan Tabel I-O Jawa Tengah yang di Update. NTB atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan mengalikan rasio-rasio di atas, dengan output perdagangan atas dasar harga konstan 2000 dari barang-barang pertanian, pertambangan dan penggalian, industri dan barang-barang impor.

## 2) Hotel

Sub sektor ini mencakup semua hotel, baik berbintang, maupun tidak berbintang serta berbagai jenis penginapan lainnya. Output hotel dihitung dengan mengalikan jumlah malam kamar dan tarif per malam kamar.

Data mengenai jumlah kamar dan tarifnya diperoleh dari hasil pengolahan Survei Hotel baik berbintang maupun non bintang di Surakarta. Sedangkan rasio nilai tambah didasarkan pada table I-O Jawa Tengah tahun 2000 yang di Update. Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan konstan 2000 dihitung berdasarkan perkalian antara rasio nilai tambah dengan outputnya.

## 3) Restoran/Rumah Makan

Data penghitungan sub-sektor Restoran/Rumah makan bersumber dari hasil inventarisasi data penunjang yang dikumpulkan oleh BPS Kota Surakarta. Cakupan data meliputi jumlah tenaga kerja sub sektor Restoran/Rumah makan.

Output tahun 2000 dihitung berdasarkan pemasukan Pajak Pembangunan I apabila dibagi dengan banyaknya tenaga kerja akan menghasilkan rata-rata output per tenaga kerja. Penghitungan output digerakkan dengan IHK Kelompok Makanan NTB diperoleh dengan cara mengalikan rasio NTB (Tabel I-O Jawa Tengah 2000) terhadap output NTB atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan metode deflasi sebagai deflatornya IHK Kelompok Makanan.

**g. Pengangkutan dan Komunikasi**

Sektor ini mencakup angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara, termasuk jasa penunjang angkutan dan jasa komunikasi serta jasa penunjang komunikasi.

1) Pengangkutan

a) Angkutan Kereta Api

Nilai Tambah Bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan Laporan Tahunan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). NTB atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi, yaitu menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang penumpang dan ton-Km barang yang diangkut.

b) Angkutan Jalan

Sub sektor ini meliputi pengangkutan barang, penumpang yang dilakukan perusahaan angkutan umum, bermotor ataupun tidak bermotor, seperti bis, taksi, dokar,

becak, dan sebagainya. NTB atas dasar harga berlaku dihitung didasarkan pada data jumlah armada angkutan umum wajib uji. Data diperoleh dari laporan data penunjang *regional income* yang dikumpulkan oleh BPS Kota Surakarta.

Rata-rata output dan rasio biaya antara, menurut jenis kendaraan, diperoleh dari hasil survei dan Tabel I-O Jawa Tengah tahun 2000 yang diupdate. NTB atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi untuk setiap jenis angkutan jalan raya.

c) Jasa Penunjang Angkutan

Meliputi kegiatan pemberian jasa penyediaan fasilitas yang menunjang dan berkaitan dengan pengangkutan, seperti terminal dan parkir, ekspedisi, bongkar muat, serta jasa penunjang lainnya.

d) Terminal dan Perparkiran

Kegiatan ini mencakup pelayanan dan pengaturan lalu lintas kendaraan/armada yang membongkar atau memuat barang maupun penumpang, seperti terminal dan parkir, pelabuhan laut, bandara, dan sungai. Pelayanan yang diberikan meliputi fasilitas berlabuh, tambah pandu, distribusi air tawar serta pencatatan muatan barang dan penumpang. Data tarif, rata-rata output per indikator produksi dan struktur biaya diperoleh dari Survei Khusus

Pendapatan Regional. Data produksi bersumber dari Perum Pelabuhan, data penunjang dan laporan DLLAJR. NTB atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi, deflatornya IHK aneka barang dan jasa.

e) Bongkar Muat

Kegiatan bongkar muat mencakup pemberian pelayanan bongkar muat angkutan barang melalui laut dan darat. Indikator produksi untuk bongkar muat melalui laut adalah jumlah barang dibongkar dan dimuat, yang datanya bersumber dari Perum Pelabuhan. Data untuk penghitungan rata-rata output dan struktur biaya diperoleh dari table, I-O Jawa Tengah 2000 Yang di Update. Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara deflasi memakai IHK Umum.

f) Jalan dan Jembatan Tol

Mencakup jasa penggunaan jalan dan jembatan tol yang hanya dikelola oleh PT. Jasa Marga. Data untuk perhitungan output diperoleh dari tabel I-O Jawa Tengah 2000 dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks kendaraan dirinci menurut golongan kendaraan yang melewati jalan tol.

## 2) Komunikasi

Mencakup jasa pos dan giro, telekomunikasi, jasa penunjang komunikasi: Wartel dan Warparpostel.

### a) Pos dan Giro

Kegiatan pemberian jasa pos dan giro: pengiriman surat, wesel, paket, jasa giro, jasa tabungan, dan sebagainya. NTB atas dasar harga berlaku menggunakan data produksi dan struktur biaya dari Laporan produksi PT Pos Indonesia di Surakarta. NTB atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan ekstrapolasi, menggunakan indeks gabungan dari jumlah surat yang dikirim dikirim dan barang yang dipaketkan.

### b) Telekomunikasi

Meliputi pemberian jasa pemakaian telepon, telegrap, dan teleks. NTB atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Tahunan PT. Telkom Dividi Regional IV Surakarta yang dikirim ke BPS.

NTB atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang, meliputi jumlah pulas otomatis, menit interlokal, jumlah menit radio telepon, banyak kata telegram dan sebagainya, bersumber dari PT. Telkom Divisi Regional IV Surakarta.

c) Jasa Penunjang Telekomunikasi

Kegiatan penunjang telekomunikasi mencakup Wartel dan Warpostel serta Warnet. Output Wartel diperoleh dari PT. Telkom di Jawa Tengah dan biaya antara dari Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa tahun 2000. untuk output radio panggil data diperoleh dari BPS, dan struktur biaya diambilkan dari hasil SKSPJ tahun 2000.

**h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan**

Sektor ini meliputi kegiatan bank, asuransi, pegadaian, koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan lainnya, persewaan bangunan tempat tinggal dan jasa perusahaan.

1) Bank

Angka Nilai tambah Bruto sub sektor Bank atas dasar harga berlaku diperoleh dari BPS (hasil pengolahan data Bank Indonesia). Selain mencakup kegiatan Bank Umum, juga termasuk kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di wilayah Surakarta. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi, dimana IHK Umum sebagai deflatornya.

2) Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Jasa Penunjang Keuangan

Kegiatan yang dicakup meliputi asuransi, koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan bukan bank lainnya.

a) Asuransi

Penghitungan output dan nilai tambah bruto asuransi atas dasar harga berlaku diperoleh dari laporan Data Pokok dan Data Penunjang Regional Income yang dikumpulkan BPS Kota Surakarta. NTB asuransi jiwa atas dasar harga konstan 2000 diperoleh menggunakan deflasi dengan deflator IHK Umum.

b) Koperasi Simpan Pinjam

Penghitungan output diperoleh dari Laporan Data Penunjang Regional Income yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. Struktur biaya antara diambilkan dari Tabel Input-Output Jawa Tengah yang di Update. Besarnya NTB atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan metode deflasi dengan IHK umum sebagai deflatornya.

c) Pegadaian

Data output pegadaian diperoleh dari seluruh Perum Pegadaian yang melakukan kegiatan usahanya di Surakarta. NTB diperkirakan dari hasil perkalian rasio NTB terhadap output. Rasio ini diambil dari Tabel I-O Jawa Tengah 2000 yang di Update. NTB atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi, dengan deflator IHK Umum.

d) Dana Pensiun

NTB diperoleh dari hasil survey Lembaga Lembaga Keuangan Bukan Bank kepada lembaga dana pensiun yang berusaha di Surakarta. NTB kegiatan dana pensiun diperoleh dari rasio NTB terhadap output. Angka rasio diambilkan dari Tabel I-O Jawa Tengah yang di Update. Besarnya NTB atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi, IHK Umum sebagai deflatornya.

e) Sewa Bangunan

Mencakup kegiatan jasa atas penggunaan rumah/bangunan sebagai tempat tinggal tanpa memperhatikan kepemilikan bangunan tersebut. Perkiraan NTB didasarkan pada laporan Data Penunjang yang telah dikumpulkan oleh BPS Kota Surakarta. NTB atas dasar harga konstan 2000 diperkirakan dengan cara ekstrapolasi, ekstrapolatornya adalah indeks jumlah bangunan tempat tinggal.

f) Jasa Perusahaan

Sub sektor jasa perusahaan mencakup kegiatan advokat, akuntan/pembukuan, notaris, konsultan, periklanan, dan jasa perusahaan lain.

Perkiraan output didasarkan dari data tenaga kerja yang dikumpulkan BPS Kota Surakarta. Biaya antara



diambilkan dari Tabel I-O Jawa Tengah yang di Update. NTB diperoleh dengan mengeluarkan biaya antara dari output.

#### **i. Sektor Jasa-Jasa**

Kegiatan sektor jasa-jasa meliputi jasa Pemerintahan dan Hankam, Jasa Sosial Kemasyarakatan, Jasa Hiburan dan Jasa Perorangan dan Rumah Tangga.

##### **1) Jasa Pemerintahan dan Pertahanan & Keamanan**

Nilai tambah sub sektor jasa pemerintahan dan hankam terhadap PDRB terdiri dari upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah sipil dan TNI, perkiraan komponen upah dari belanja pembangunan, ditambah perkiraan penyusutan sebesar 5 persen.

Data yang dipakai didasarkan pada realisasi pengeluaran pemerintah yang berupa anggaran rutin dan anggaran belanja pembangunan. Data upah gaji pegawai negeri sipil pusat dan realisasi Anggaran Pembangunan Pusat yang ada di Surakarta diperoleh dari BPS dan Bapeda Kota Surakarta.

Data upah gaji pegawai negeri sipil pemerintah kota diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Kota (dari daftar K-2), data upah gaji pegawai negeri sipil tingkat desa diperoleh dari laporan keuangan pemerintah desa (k-3).

Cakupan sub sektor Jasa Pemerintahan dan hankam adalah seluruh pegawai negeri sipil, TNI dan Kepolisian yang bekerja di Wilayah Surakarta. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2000, untuk PNS pusat dengan ekstrapolasi, dan PNS daerah menggunakan metode deflasi.

## 2) Jasa Swasta

Sub sektor jasa swasta adalah seluruh kegiatan ekonomi jasa-jasa yang dikelola oleh swasta sedangkan yang dikelola pemerintah sudah tercakup di sub sektor Pemerintah dan Hankam. Sub sektor jasa swasta meliputi: Jasa Sosial dan Kemasyarakatan, Jasa Hiburan & Rekreasi, Jasa Perorangan dan Rumah Tangga.

### a) Jasa Sosial dan Kemasyarakatan

Kegiatan yang dicakup meliputi jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa kemasyarakatan lainnya seperti jasa palang merah, panthi asuhan, panthi wredha, yayasan pemeliharaan anak cacat, rumah ibadah dan sejenisnya, terbatas yang dikelola oleh swasta saja. Kegiatan sejenis yang dikelola oleh pemerintah termasuk sub sektor pemerintahan.

### b) Jasa Pendidikan

Data yang digunakan untuk memperkirakan nilai tambah adalah jumlah murid sekolah swasta menurut jenjang pendidikan, dari Departemen Dikbud. Data output

per murid dan rasio nilai tambah diperoleh dari survey khusus yang dilakukan BPS Kota Surakarta. Perhitungan NTB atas dasar harga konstan 2000, dilakukan dengan cara deflasi dan deflatornya adalah IHK Sub Kelompok Pendidikan.

c) Jasa Kesehatan

Kegiatan jasa kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Dokter Praktek dan jasa kesehatan lain yang dikelola oleh swasta. Perkiraan output diperoleh dari perkalian rata-rata output per tempat tidur rumah sakit dengan jumlah tempat tidur, rata-rata output per pasien dengan jumlah pasien di dokter pasien, rata-rata output per bidan dengan jumlah bidan praktek.

NTB atas dasar harga berlaku dihitung dengan mengalikan rasio nilai tambah terhadap output. Data yang digunakan dari Laporan Data Penunjang oleh BPS Kota Surakarta.

d) Jasa Sosial dan Kemasyarakatan Lainnya

Hasil survey khusus terhadap panti asuhan dan panti wredha, diperoleh rata-rata output per anak yang diasuh dan rata-rata orang tua yang dilayani. Kemudian mengalikannya jumlah anak yang diasuh dan orang tua yang dilayani dengan data dari Departemen Sosial dan

Data Penunjang dari BPS Surakarta, diperoleh output dan NTB atas dasar harga berlaku.

NTB atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi. Output dan nilai tambah kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) diperoleh dari survey Khusus Pendapatan Regional. Nilai Tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara deflasi, deflatornya IHK Pendidikan, Rekreasi, Olahraga. Data PMI diperoleh dari kantor PMI di Surakarta.

e) Jasa Hiburan dan Kebudayaan

Sub sektor ini mencakup kegiatan bioskop, panggung/taman hiburan, studio radio swasta, klub malam, klub wisata, obyek wisata dan jasa hiburan lainnya.

Output bioskop atas dasar harga berlaku dihitung dengan mengalikan banyaknya penonton dengan rata-rata tarif per penonton. Struktur biaya bersumber pada tabel I-O Jawa Tengah 2000 yang di Update.

NTB atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan deflasi, deflatornya IHK Rekreasi dan Olahraga. Output dan nilai tambah panggung hiburan diperoleh dengan mengalikan rata-rata output/tenaga kerja dengan banyaknya tenaga kerja. Data tenaga kerja diperoleh dari Laporan Data Penunjang BPS Kota Surakarta. Nilai

tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan deflasi, deflatornya IHK Aneka Barang dan Jasa.

Kegiatan studio swasta, taman hiburan dan klub malam, perkiraan nilai tambah berdasar jumlah tenaga kerja, rata-rata output per tenaga kerja. Struktur biaya diperoleh dari tabel I-O Jawa Tengah 2000 yang di Update. Nilai tambah tahun berikutnya menggunakan indikator pertumbuhan tenaga kerja dan IHK Rekreasi dan Olahraga sebagai deflatornya.

f) Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

Mencakup jasa perbengkelan, raparasi, jasa perorangan dan pembantu rumah tangga. Data produksi dan harga/rata-rata output per indikator, diperoleh dari Laporan Data Penunjang dari BPS Kota Surakarta dari hasil Survei Khusus (SKPR).

Untuk tahun yang dilakukan survey, rata-rata output per indikator digerakkan menggunakan IHK Perlengkapan rumah tangga, barang pribadi dan rekreasi dan olahraga. Hasil perkalian produksi/indikator produksi dengan harga/indikator harga akan diperoleh besarnya output.

NTB diperoleh dengan mengalikan output dengan rasio NTB dari Tabel I-O Jawa Tengah yang di Update. NTB atas dasar harga konstan 2000, diperoleh dengan cara

deflasi, sebagai deflatornya IHK Perlengkapan rumah tangga, barang pribadi dan rekreasi dan olah raga.

## B. Analisa Data

Penelitian yang telah dilakukan di Kota Surakarta ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan tiap sektor dan pertumbuhan PDRB yang terjadi di Kota Surakarta sehingga dapat diketahui sektor-sektor apa saja yang bisa dikembangkan dalam jangka waktu tertentu untuk kemajuan dan peningkatan pendapatan daerah.

1. Analisis untuk menentukan sektor-sektor basis di Kota Surakarta menjadi sektor unggulan di Propinsi Jawa Tengah

Peranan tiap sektor dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian daerah. Demikian juga peranan sektoral yang terdapat di Kota Surakarta dapat diketahui dengan perhitungan *Location Quetien* (LQ) agar dapat menentukan sektor unggulan yang ada. Contoh perhitungan menentukan LQ sektor pertanian Kota Surakarta pada tahun 2001, yaitu sebagai berikut:

$$X_{in} = 3.413,61$$

$$Y_n = 3.113.668,99$$

$$X_i = 26.417.424,36$$

$$Y = 118.816.400,29$$

Sehingga, LQ dari sektor pertanian adalah:

$$LQ = \frac{X_{in} / Y_n}{X_i / Y}$$

$$= \frac{3.413,61/3.113.668,99}{26.417.424,36/118.816.400,29}$$

$$= 0,005$$

Kemudian dengan metode perhitungan yang sama, diulang pada semua sektor dari tahun 2001-2005

2. Analisis menentukan posisi dan reposisi sektor basis dalam perkembangan ekonomi Kota Surakarta

Posisi reposisi sektoral dari pendapatan daerah di Kota Surakarta dapat diketahui melalui perhitungan laju pertumbuhan sektoral dari tahun 2001-2005. Dari hal laju perkembangan sektoral tersebut kemudian dihitung rata-rata laju pertumbuhan setiap sektor pertumbuhan dan total PDRB Propinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta untuk mengetahui hasil dari *Dynamic Location Question* (DLQ). Contoh perhitungan terhadap sektor pertanian dari tahun 2001-2005 sebagai berikut:

$$g_{in} = -5,97\%$$

$$g_i = 5,17\%$$

$$G_i = 2,79\%$$

$$G = 4,52\%$$

$$t = 5 \text{ tahun}$$

Sehingga hasil perhitungan *Dynamic Location Question* (DLQ) dari sektor pertanian Kota Surakarta adalah:

$$DLQ = \left\{ \frac{(1 + g_{in}) / (1 + g_n)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right\}^t$$

$$= \left\{ \frac{(1 + (-5,97))/(1 + 5,17)}{(1 + 2,79)/(1 + 4,52)} \right\}^5$$

$$= -3,86$$

Dengan metode perhitungan yang sama dari rata-rata laju pertumbuhan PDRB dan jumlah seluruh hasil PDRB sektoral dari tahun 2001-2005.

3. Analisis faktor-faktor yang menentukan posisi dan reposisi sektor basis dalam pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta

Penentuan faktor-faktor posisi dan reposisi terhadap sektor basis dihitung dengan mencari nilai Indeks Total Keunggulan Kota Surakarta terlebih dahulu. Kemudian hasil dari nilai ITKD tersebut dimasukkan dalam rumus *Total Shift Share* (TSS) Kota Surakarta untuk mengetahui hasilnya. Perhitungan ITKDnya adalah sebagai berikut:

$$g_n = 5,17$$

$$G = 4,52$$

Sehingga ITKD Kota Surakarta dapat dihitung:

$$\text{ITKD} = (g_n - G) \dots\dots (i)$$

$$= 5,17 - 4,52$$

$$= 0,65$$

Nilai *Total Shift Share* (TSS) dapat diketahui dari hasil kali antara ITKD dengan PDRB Kota Surakarta pada awal tahun (2001) sebagai berikut:

$$\text{TSS} = (g_n - G) Y_n \dots\dots (ii)$$

$$= 0,65 \times 3.113.668,99$$



$$= 2.023.884,84$$

Nilai TSS sektoral dapat dihitung dengan perhitungan di rata-rata laju pertumbuhan sektoral tertentu dari Kota Surakarta dan rata-rata laju pertumbuhan sektor tertentu dari Propinsi Jawa Tengah. Contoh perhitungan TSS sektoral yaitu sektor pertanian yaitu:

$$\begin{aligned} \text{TSS} &= \Sigma(g_n - g_{in}) X_{ino} + \Sigma(G_i - G) X_{ino} + \Sigma(g_{in} - G_i) X_{ino} \dots\dots \text{(iii)} \\ &= (5,17 - (-5,97)) * 3.413,61 + (2,79 - 4,52) * 3.413,61 + (-5,97 \\ &\quad - 2,79) * 3.413,61 \\ &= 2.218,85 \end{aligned}$$

Perhitungan di atas kemudian diuraikan dengan memasukkan  $g_{in}$  dan  $G_i$  ditambah pada seluruh sektor yang ada sehingga menjadi perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{SSS} &= \Sigma(G_i - G) X_{ino} - \Sigma(g_n - g_{in}) X_{ino} \\ &= (2,79 - 4,52) * 3.413,61 - (5,17 - (-5,97)) * 3.413,61 \\ &= -43.919,51 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LSS} &= \Sigma(g_{in} - G_i) X_{ino} \\ &= ((-5,97) - 2,79) * 3.413,61 \\ &= -29.903,22 \end{aligned}$$

Selanjutnya dengan metode perhitungan yang sama, diulang pada semua sektor usaha dan hasilnya dijumlahkan pada semua sektor.

### C. Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Hasil analisis menentukan sektor-sektor basis di Kota Surakarta menjadi sektor unggulan di Propinsi Jawa Tengah

Hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat enam sektor yang dapat dijadikan sebagai sektor unggulan di Kota Surakarta. Adanya parameter bahwa jika  $LQ > 1$  maka sektor di daerah lebih unggul dibandingkan sektor di daerah Kabupaten lain di Propinsi Jawa Tengah telah terpenuhi oleh ketiga sektor tersebut (sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier).

Nilai LQ yang tertinggi ditempati oleh sektor listrik, gas dan air bersih walaupun selama tahun 2001-2005 terus mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2001 sebesar 3,076 mengalami penurunan menjadi 2,904 di tahun 2002. Sedikit peningkatan terjadi di tahun 2003 sehingga nilai LQ menjadi 2,909; kemudian secara berturut-turut mengalami penurunan di tahun 2004 dan 2005 menjadi 2,881 dan 2,717. Sektor tertinggi kedua ditempati sektor keuangan, persewaan dan Js perusahaan. Pada sektor keuangan, persewaan dan Js perusahaan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, terbukti pada tahun 2001 mempunyai nilai 2,677 mengalami peningkatan menjadi 2,724 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2005 menjadi 2,849. Sektor tertinggi ketiga ditempati oleh sektor bangunan, sektor ini dari tahun 2001-2005 mengalami pasang surut, dimulai tahun 2001 yang mempunyai nilai LQ sebesar 2,525 kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2004 menjadi 2,157; baru di tahun 2005 mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,184. Sektor tertinggi keempat ditempati oleh sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor ini dari tahun 2001-2005 mengalami perkembangan yang cukup

dinamis, terlihat dari tahun 2001 dengan nilai 2,150 terus mengalami penurunan hingga tahun 2003 menjadi 2,093. Peningkatan terjadi di tahun 2004 menjadi 2,122 yang kemudian kembali mengalami penurunan menjadi 2,085. Sektor tertinggi kelima adalah pada sektor jasa-saja. Meskipun terjadi perkembangan yang tidak teratur namun sektor ini masih terus menjadi sektor basis dari tahun 2001-2005. Pada tahun 2001 besarnya LQ adalah 1,161 yang kemudian mengalami peningkatan di tahun 2002 menjadi 1,340. Namun setelah itu terus mengalami penurunan hingga tahun 2005 menjadi 1,219. Sektor tertinggi keenam adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Terlihat pada tahun 2001 besarnya LQ pada sektor ini adalah 1,135 kemudian terus mengalami peningkatan hingga tahun 2005 menjadi 1,257.

Jika  $LQ > 1$  maka sektor listrik, gas dan air bersih; keuangan, persewaan dan Js perusahaan; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; jasa-saja dan sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kota Surakarta merupakan sektor basis yang perlu diprioritaskan pengembangannya.

Sedangkan untuk sektor-sektor usaha yang lain kurang memenuhi syarat untuk dijadikan sektor unggulan, meskipun terdapat perkiraan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki prospek yang bagus dalam jangka panjang. Sebab, indeks LQ dari sektor-sektor yang lain kurang dari satu atau bahkan ada yang mengalami penurunan rutin setiap tahunnya.

Untuk hasil perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10 Indeks LQ Kota Surakarta terhadap Propinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha tahun 2001-2005.

No	Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
1	Pertanian	0.005 <sup>^</sup>	0.004 <sup>^</sup>	0.004 <sup>^</sup>	0.004 <sup>^</sup>	0.004 <sup>^</sup>
2	Pertambangan dan Penggalian	0.050 <sup>^</sup>	0.052 <sup>^</sup>	0.051 <sup>^</sup>	0.050 <sup>^</sup>	0.047 <sup>^</sup>
3	Industri Pengolahan	0.945 <sup>^</sup>	0.938 <sup>^</sup>	0.948 <sup>^</sup>	0.945 <sup>^</sup>	0.915 <sup>^</sup>
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	3.076 <sup>*</sup>	2.904 <sup>*</sup>	2.909 <sup>*</sup>	2.881 <sup>*</sup>	2.717 <sup>*</sup>
5	Bangunan	2.525 <sup>*</sup>	2.418 <sup>*</sup>	2.293 <sup>*</sup>	2.157 <sup>*</sup>	2.184 <sup>*</sup>
6	Perdagangan, Hotel dan Retoran	1.135 <sup>*</sup>	1.162 <sup>*</sup>	1.176 <sup>*</sup>	1.240 <sup>*</sup>	1.257 <sup>*</sup>
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.150 <sup>*</sup>	2.110 <sup>*</sup>	2.093 <sup>*</sup>	2.122 <sup>*</sup>	2.085 <sup>*</sup>
8	Keuangan, Persewaan dan JS Perusahaan	2.677 <sup>*</sup>	2.724 <sup>*</sup>	2.752 <sup>*</sup>	2.802 <sup>*</sup>	2.849 <sup>*</sup>
9	Jasa-Jasa	1.161 <sup>*</sup>	1.340 <sup>*</sup>	1.231 <sup>*</sup>	1.219 <sup>*</sup>	1.219 <sup>*</sup>
<b>PDRB</b>		<b>13.724</b>	<b>13.653</b>	<b>13.457</b>	<b>13.419</b>	<b>13.277</b>

Sumber: Data diolah dari PDRB Kota Surakarta dan Propinsi Jawa Tengah

Keterangan:

\* Sektor basis

<sup>^</sup> Sektor non basis

- Hasil analisis menentukan posisi dan reposisi sektor basis dalam pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta

Penentuan posisi maupun reposisi dari sektor usaha yang ada di Kota Surakarta dapat dilakukan dengan cara menghitung laju pertumbuhan sektoral dari tahun 2001-2005, baik dari Kota Surakarta maupun Propinsi Jawa Tengah. Perhitungan laju pertumbuhan sektoral tersebut selanjutnya dimasukkan dalam suatu rumusan yang disebut dengan *Dynamic Location Quotion (DLQ)*.

Parameter DLQ menunjukkan bahwa jika  $DLQ > 1$ , maka Kota Surakarta dapat bersaing dengan Kabupaten lain di Propinsi Jawa Tengah. Di Kota Surakarta terdapat satu sektor yang dapat bersaing di Propinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil DLQ yaitu sektor keuangan, persewaan dan Js perusahaan dengan nilai 7,973. Berdasarkan hal itu delapan sektor lainnya tidak dapat dijadikan standar dari DLQ, hal tersebut diketahui karena indeks DLQ ke delapan sektor tersebut masih mencapai di bawah satu. Hasil indek DLQ dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11 Rata-rata Laju Pertumbuhan Kota Surakarta dan Propinsi Jawa Tengah serta Indeks DLQ tahun 2001-2005.

No	Lapangan Usaha	Rata-rata (G)	Rata-rata (g)	DLQ
1	Pertanian	2.79	-5.97	3.860
2	Pertambangan dan Penggalian	5.77	3.16	0.088
3	Industri Pengolahan	5.26	4.54	0.542
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	6.45	6.12	0.796
5	Bangunan	8.67	5.07	0.098
6	Perdagangan, Hotel dan Retoran	6.17	6.01	0.892
7	Pengangkutan dan Komunikasi	6.17	4.53	0.272
8	Keuangan, Persewaan dan JS Perusahaan	3.15	5.29	7.973
9	Jasa-Jasa	7.64	6.08	0.369
<b>PDRB</b>		4.52	5.17	1.745

Sumber: Data diolah dari PDRB Kota Surakarta dan Propinsi Jawa Tengah

- Hasil analisis faktor-faktor yang menentukan posisi dan reposisi sektor basis dalam pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, ITKD di Kota Surakarta menunjukkan nilai 0,65%. Hal ini menyatakan bahwa secara keseluruhan laju pertumbuhan sektoral Kota Surakarta menang

bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Propinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan parameternya yaitu:

- a. Apabila  $ITKD < 0$ , maka dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan laju pertumbuhan sektoral daerah (Kota Surakarta) memenangkan persaingan dengan kabupaten lainnya di Propinsi Jawa Tengah.
- b. Apabila  $ITKD > 0$ , maka dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan laju pertumbuhan sektoral daerah (Kota Surakarta) kalah bersaing dengan kabupaten lainnya di Propinsi Jawa Tengah.

Sedangkan dari perhitungan TSS dapat dilihat bahwa ITKD sebesar 2.023.884,84 juta rupiah, merupakan peningkatan yang diperoleh dari hasil pertumbuhan selama 5 tahun. Dan sumbangan yang diperoleh dari *Location Shift Share* (LSS) sebesar 2.023.884,84. Nilai LSS sebesar itu merupakan laba struktural atau yang disebut dengan *Structural Shift Share* (SSS) sebesar 0,00 rupiah.

Setiap sektor dapat dihitung nilai TSS, LSS maupun SSSnya dengan memasukkan rata-rata laju pertumbuhan sektor tertentu di Kota Surakarta maupun rata-rata laju pertumbuhan sektor tertentu di Propinsi Jawa Tengah. Untuk hasil perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan TSS-SSS-LSS Kota Surakarta tahun 2001-2005.

No	Lapangan Usaha	TSS	SSS	LSS
1	Pertanian	2.218,85	-43.919,51	-29.903,22
2	Pertambangan dan Penggalian	1.009,28	-1.189,40	-4.049,55
3	Industri Pengolahan	598.251,19	99.401,74	-664.519,01

4	Listrik, Gas dan Air Bersih	45.718,13	202.707,17	-23.351,42
5	Bangunan	237.905,58	1.481.602,77	1.315.434,87
6	Perdagangan, Hotel dan Retoran	498.975,85	1.909.926,04	-124.360,14
7	Pengangkutan dan Komunikasi	204.257,30	316.127,45	-516.613,85
8	Keuangan, Persewaan dan JS Perusahaan	201.593,48	-385.818,91	663.087,49
9	Jasa-Jasa	233.955,18	1.448.362,50	-562.212,28
<b>PDRB</b>		2.023.884,84	0,00	2.023.884,84

*Sumber: Data diolah dari PDRB Kota Surakarta dan Propinsi Jawa Tengah*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sektor listrik, gas dan air bersih; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; jasa-saja dan sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kota Surakarta merupakan sektor basis yang akan menjadi sektor unggulan di Propinsi Jawa Tengah.
2. Posisi perekonomian Kota Surakarta unggul dengan kabupaten atau kota lain di Propinsi Jawa Tengah, sehingga reposisinya Kota Surakarta mampu bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Propinsi Jawa Tengah di masa yang akan datang.
3. Di Kota Surakarta terdapat satu sektor yang dapat bersaing di Propinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil DLQ yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
4. Secara keseluruhan laju pertumbuhan sektoral Kota Surakarta mampu bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Propinsi Jawa Tengah.
5. Faktor-faktor yang menentukan posisi dan reposisi sektor basis dipengaruhi oleh seberapa besar potensi kesejahteraan daerah. Diantarnya adalah:



- a. Wilayah Kota Surakarta secara umum keadaan wilayahnya terdiri dari dataran rendah, sehingga hal ini sangat sesuai untuk daerah perkotaan yang terdiri dari berbagai perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun swasta, seperti pusat perbelanjaan, pasar dan lain sebagainya.
- b. Faktor tingkat pendidikan, pendudukan kota Surakarta telah mempunyai tingkat pendidikan lebih dari standar pemerintah, sehingga secara perekonomian akan sangat membantu perkembangan Kota Surakarta.
- c. Sebagian besar penduduk Kota Surakarta bermata pencaharian sebagai buruh, hal inilah yang mempengaruhi berkembangnya perekonomian Kota Surakarta menjadi sektor basis di berbagai sektoral dan khususnya pada sektor perindustrian dan perusahaan.

## **B. Saran**

Berberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Kota Surakarta demi kemajuan daerah dalam rangka memajukan pembangaunan Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Perhatian yang lebih pada potensi sumber daya alam harus diperhatikan Pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta harus lebih selektif dalam memilih daerah mana yang dapat mendukung untuk dibangun sesuai dengan potensi per sektornya.
2. Pemerintah Kota Surakarta harus bisa memajukan pendidikan di setiap lapisan masyarakat dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan secara

berkala serta membangun infrastruktur yang memadai, demi kelancaran perekonomian Pemerintah Kota Surakarta, sehingga kota Surakarta tetap menjadi sektor unggulan di Propinsi Jawa Tengah.

3. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang berpotensi dan membuka lapangan kerja yang bertujuan mengajukan potensi dari masyarakat Kota Surakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1997, *Ekonomi Pembangunan* , Yogyakarta: LPFE-UI
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPF
- Badriah Lilis.2003 . *Identifikasi Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Di Propinsi Jawa Tengah*. JEBA. Vol 5. No 2
- Budiono Sri Handoko, 1999, *Beberapa Catatan Tentang Konsep Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Masa Krisis Ekonomi*. Jurnal Ekonomi, Vol 2 No.1 Surakarta: FE-UNS
- BPS Surakarta. 2005. *Produk Domestik Regional Kota Surakarta 2005*
- BPS Surakarta. 2005. *Kota Surakarta Dalam Angka 2005*
- BPS Surakarta. 2005. *Profil Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2005*
- BPS Surakarta. 2006. *Jawa Tengah Dalam Angka 2006*
- Budiono Sri Handoko, 1999, *Beberapa Catatan Tentang Konsep Pembangunan Ekonomi Regional Dalam Masa Krisis Ekonomi*. Jurnal Ekonomi Volume 2 No.1 Surakarta :FE-UNS
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- FE UNS. 2003. *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*. Surakarta : FE UNS
- Jhingan, ML. 1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Joko Suprpto, Liling. 2006. *Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Basis Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1998-2004 (Implementasi Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Skripsi. FE UNS. Tidak dipublikasikan
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta : UPP-AMP YKPN
- Meinawati, 2008. *Analisis Export Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Pasca Krisis Ekonomi (Tahun 2000-2006)*. Skripsi FE - UNS

- Nazara dan Nukholis. 2007. *Ukuran Optimal Pemerintah Daerah Di Indonesia: Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Era Desentralisasi*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol VII No.02
- Prapto Yuwono. 1999. *Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU 22/1999 dan UU 25/1999*. Kritis. Volume XII. Salatiga.
- Soetarno dan Arsyad, Lincolin. 1993. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : UPP-AMP YKPN
- Sri Rahayu dan Daryono Subagiyo. 2004. *Analisis Export Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Dati I Jawa Timur Periode 1997-2001*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.5, No. 1, Juni 2004, hal. 81-97
- Suparmoko. 1994. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta : BPFE
- Suyatno. 2000. *Analisa Economic Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri : Menghadapi Implementasi UU No.22/1999 dan UU No.25/1999*. Jurnal Ekonomi Pembangunan .Volume 1 No.2, Surakarta. Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi FE-UMS.
- Wibisono Yusuf. 2005. *Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi Di Indonesia,1984-2000*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol.V. No 02
- Wrihatnolo Randy, S sos, MADM. 2007. *Pembangunan Daerah Membumikan Millenium Development Goals (MDGs) Kedalam Kebijakan Pembangunan Di Daerah*. Perencanaan Pembangunan Daerah No 1 Tahun XIII.
- Yulandari, Ariefah. 2003. *Analisa Economic Base Terhadap Pertumbuhan Kabupaten Bantul Guna Meningkatkan Pembangunan Di Daerah Istimewa Jogjakarta*, Skripsi FE - UMS